

**EFEKTIVITAS PENERAPAN PASAL 8 POJK NOMOR 19/POJK.03/2014
TENTANG LAYANAN KEUANGAN TANPA KANTOR DALAM
RANGKA KEUANGAN INKLUSIF MENGENAI KEWAJIBAN
PENYALURAN KREDIT BAGI UMKM
(Studi di BRI Cabang Manukan Surabaya)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan dalam Ilmu Hukum**

Oleh :

**DINAR WIBISONO MUKTI AJI
NIM. 105010101111030**



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2018**

HALAMAN PENGESAHAN**SKRIPSI**

**EFEKTIVITAS PENERAPAN PASAL 8 POJK NOMOR 19/POJK.03/2014
TENTANG LAYANAN KEUANGAN TANPA KANTOR DALAM
RANGKA KEUANGAN INKLUSIF MENGENAI KEWAJIBAN
PENYALURAN KREDIT BAGI UMKM
(Studi di BRI Cabang Manukan Surabaya)**

Dinar Wibisono Mukti Aji
NIM : 105010101111030

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Majelis Penguji pada tanggal 7 Agustus 2018 dan disahkan pada tanggal 10 Agustus 2018

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Dr. Siti Hamidah, S.H., MM.
NIP : 19660622 199002 2 001

Dr. Reka Dewantara, S.H., MH.
NIP : 198305022 00812 1 003

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Ketua Bagian
Hukum Perdata

Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si
NIP : 19620805 198802 1 001

Dr. Budi Santoso, S.H., LL.M.
NIP : 19720622 200501 1 002

IDENTITAS TIM PENGUJI

Dr. Siti Hamidah, S.H., MM.	NIP : 19660622 199002 2 001
Dr. Reka Dewantara, S.H., MH.	NIP : 19830502 200812 1 003
Ranitya Ganindha, S.H., M.H.	NIP : 19880630 201404 2 001
Diah Pawestri Maharani, S.H., M.H.	NIP : 0023078305



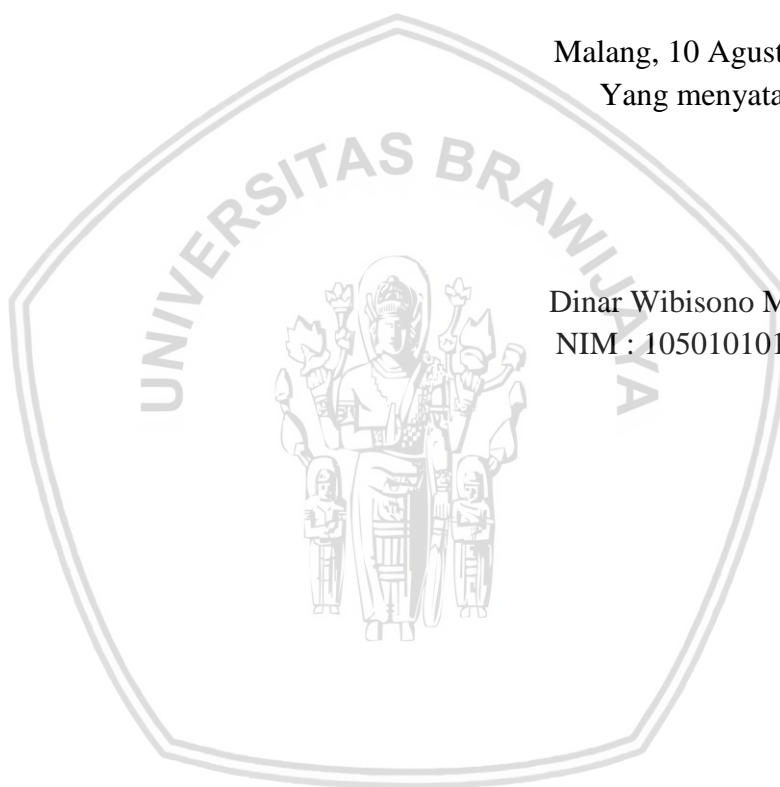
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa karya ilmiah hukum ini adalah hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain, saya sanggup dicabutatas gelar kesarjanaan saya.

Malang, 10 Agustus 2018

Yang menyatakan,



Dinar Wibisono Mukti Aji

NIM : 105010101111030

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP
CURRICULUM VITAE****DATA PRIBADI**

NAMA	: DINAR WIBISONO MUKTI AJI
TEMPAT, TANGGAL LAHIR	: MADIUN, 5 OKTOBER 1992
JENIS KELAMIN	: LAKI-LAKI
AGAMA	: ISLAM
STATUS	: BELUM MENIKAH
ALAMAT	: DESA MADIGONDO RT20 RW02, TAKERAN, MAGETAN, JAWATIMUR
NOMOR HP	: 081259788777
E-MAIL	: wibisono.dinar@ymail.com

DATA KEPENDIDIKAN

SEKOLAH DASAR	: SD NEGERI 02 MANGUHARJO
SEKOLAH MENEGAH PERTAMA	: SMP NEGERI 1 MADIUN
SEKOLAH MENENGAH ATAS	: SMA NEGERI 2 MADIUN
PERGURUAN TINGGI	: FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS BRAWIJAYA

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada ALLAH SWT, atas segala rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi dengan judul, “Efektivitas Penerapan Pasal 8 Pojk Nomor 19/Pojk.03/2014 Tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif Mengenai Kewajiban Penyaluran Kredit Bagi UMKM (Studi Di Bri Cabang Manukan Surabaya)” dapat diselesaikan. Skripsi ini diajukan sebagai bagian dari tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini telah mendapat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Rachmad Safa'at S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Ibu Dr. Budi Santoso, S.H. LLM selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Ibu Dr. Siti Hamidah SH., MM., selaku Dosen Pembimbing Utama Penulis yang telah meluangkan waktunya untuk mengarahkan, membimbing, memberikan ide dan gagasan serta kritik dan saran dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Reka Dewantara S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pendamping Penulis yang telah meluangkan waktunya untuk mengarahkan, membimbing, memotivasi, serta kritik dan saran dalam proses penulisan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah mendidik dan memberikan pelayanan yang baik selama Penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
6. Ayah dan Ibu tercinta, Budi Rahardjo dan Nur Indah Kuswardani atas segala kasih sayang, pengorbanan, kesabaran, dukungan materiil dan moril serta doa dan restu yang diberikan kepada Penulis.
7. Teman-teman yang telah memberikan motivasi dan do'a sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak sengaja.

Malang, 20 Mei 2018

Dinar Wibisono M. A.



RINGKASAN

Dinar Wibisono Mukti Aji, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Mei 2017, EFEKTIVITAS PENERAPAN PASAL 8 POJK NOMOR 19/POJK.3/2014 TENTANG LAYANAN KEUANGAN TANPA KANTOR DALAM RANGKA KEUANGAN INKLUSIF MENGENAI KEWAJIBAN PENYALURAN KREDIT UMKM, Dr. Siti Hamidah, SH., MM., Dr. Reka Dewantara, SH., MH.

BRI Cabang Manukan memiliki layanan *Branchless Banking* atau Lakupandai. Lakupandai merupakan kegiatan pemberian jasa layanan sistem pembayaran dan keuangan terbatas yang dilakukan tanpa melalui kantor fisik bank, maupun dengan menggunakan sarana teknologi dan/atau jasa pihak ketiga terutama untuk melayani masyarakat yang belum terlayani jasa keuangan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulisan karya ini mengangkat rumusan masalah: seberapa efektif penerapan Pasal 8 POJK Nomor 19/POJK.3/2014 dalam rangka penyaluran kredit UMKM, serta bagaimana upaya dalam mengatasi hambatannya tersebut.

Penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis empiris. Pembahasan tentang efektifitas penerapan dan upaya dalam mengatasi hambatan penerapan layanan tanpa kantor (Lakupandai) masih banyak mengalami kendala, penelitian ini berkaitan dengan kenyataan di masyarakat pengguna jasa layanan keuangan. Maka dari itu peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis empiris.

Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban yaitu perlu ada sosialisasi secara baik, benar, guna mencapai efektivitas pasal 8 POJK Nomor 19/POJK.03/2014 tentang layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif, terjadinya tumpang tindih terhadap penerapan pasal POJK Nomor 19/POJK.03/2014 dalam penyaluran kredit terhadap UMKM di BRI Cabang Manukan, calon nasabah kredit masih enggan mengajukan kredit melalui agen dikarenakan lebih rumit daripada datang ke kantor BRI terdekat. Apabila calon debitur ingin mengajukan kredit di agen Brilink mereka di survey dahulu oleh pihak agen Brilink. Tahapan- tahapan tersebut biasanya lebih dari ketetapan BRI dalam waktu pencairan kredit yaitu 14 hari kerja. Saran yang dapat diberikan bagi Kantor BRI Cabang Manukan sebaiknya memperhatikan para agen BriLinknya dengan terus aktif mengadakan sosialisasi kepada paguyuban Linkman, misalnya satu bulan sekali di adakan sosialisasi. Agar kendala dilapangan cepat terselesaikan. Perealisasi terhadap calon debitur perlu adanya penyederhanaan sehingga menjadi pemahaman yang meyakinkan calon nasabah untuk menjadi yakin terhadap penyaluran kredit UMKM melalui Agen BriLink.

SUMMARY

Dinar Wibisono Mukti Aji, Business Civil Law, Faculty of Law Brawijaya University Mei 2017, EFFECTIVENESS OF ARTICLES 8 POJK NUMBER 19/POJK.3/2014 ABOUT FINANCIAL SERVICES WITHOUT OFFICE IN INCLUSIVE FINANCIAL FRAMEWORK OF SME'S CREDIT DISTRIBUTION OBLIGATION Dr. Siti Hamidah, SH., MM., Dr. Reka Dewantara, SH., MH.

BRI Branch MANUKAN have Branchless Banking service or smartmanners. smartmanners is an activity of providing payment system services and limited finances made without going through the physical office of the bank, or by using technological means and third party services primarily to serve the community which have not served the financial services

Based on the above, writing this paper raised the problem formulation : how effective the application of Article 8 POJK NUMBER 19/POJK.3/2014 in order to distribute credit OF SME'S, as well as how efforts to overcome these obstacles.

Writing this paper using empirical juridical method. A discussion of the effectiveness of implementation AND efforts to address barriers to the implementation of non-office services OF (smartmanners) there are still many obstacles, this study deals with the reality in the community of users of financial services. Therefore the researcher uses a kind of juridical empirical research.

From the results of research with the above method, the authors get the answer that there needs to be socialization well, to achieve the effectiveness of the article 8 POJK NUMBER 19/POJK.03/2014 about non-office financial services in the framework of inclusive finance, the overlapping of the application of the article POJK NUMBER 19/POJK.03/2014 in the distribution of credit to SME'S IN BRI Manukan Branch, prospective credit customers are still reluctant to apply for credit through the agency because it is more complicated than to COME nearest BRI office. If the prospective debtor wants to apply for credit in the agent Brilink them in the survey first by the agent Brilink. the stage is usually more than the provisions of BRI in the time of credit disbursement that is 14 working days.

Suggestions can be given to the BRI Branch Manukan Office should pay attention to its BriLink agents by continuing to actively socialize to the Linkman community, for example once a month held for socialization. In order to quickly solve the problem constraints. Realization of prospective borrowers need simplification so it becomes a convincing understanding of potential customers to be confident about lending SME'S through Agent BriLink.



DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	ii
Identitas Tim Pengujin	iii
Pernyataan Keaslian Skripsi	iv
Daftar Riwayat Hidup	v
Kata Pengantar	vi
Ringkasan	viii
<i>Summary</i>	ix
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xi
Daftar Gambar	xii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
E. Sistematika Penulisan	14
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Efektivitas	16
B. Kajian Umum Tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Atau Laku Pandai	21
C. Kajian Umum Tentang Keuangan Inklusif	26
D. Kajian Umum Tentang Kredit	32
E. Tinjauan Umum Tentang UMKM	45
 BAB III METODE PENELITIAN	
1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian	48
2. Lokasi Penelitian	49
3. Jenis Dan Sumber Data	49
4. Teknik Pengumpulan Data	52
5. Populasi Dan Sampel	53
6. Teknik Analisis Data	54
7. Definisi Operasional	57
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	61
B. Gambaran Umum Perkembangan Layanan Keuangan Tanpa Kantor Di BRI Cabang Manukan	72
C. Efektivitas Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Penyaluran Kredit Di BRI Cabang Manukan	76
D. Hambatan Dalam Pelaksanaan Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Penyaluran Kredit	87

E. Upaya Mengatasi Hambatan dalam Pelaksanaan Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Penyaluran Kredit	89
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	92
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Orisinalitas Penelitian	10
Tabel 2. Pola Angsuran Kredit Modal Kerja	79



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Geografis Kota Surabaya	64
Gambar 2. Struktur Organisasi PT. BRI Cabang Manukan	71
Gambar 3. Ketentuan Layanan LakuPandai	72
Gambar 5. Agen BRILink	73
Gambar 4. Alur Permohonan Kredit Melalui Agen BRILink	83



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Guna mengimplementasikan perekonomian nasional yang mampu tumbuh dan berkembang secara stabil dan berkelanjutan, diperlukan kegiatan di sektor jasa keuangan dengan diselenggarakannya secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Penerapan sistem dimaksud guna mewujudkan sirkulasi keuangan yang terus bisa tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan, stabil dan mampu melindungi kepentingan masyarakat konsumen. Kaitan ini Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut dengan OJK) merupakan amanat dari Pasal 34 Nomor 6 tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-undang. Dengan demikian OJK merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara terpadu, independen, dan akuntabel. Sektor jasa keuangan sebagai objek pengaturan dan pengawasan OJK terdiri dari sektor Perbankan, Pasar Modal, PerAsuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Kaitan ini sektor Perbankan sebagai salah satu bagian dari sektor jasa keuangan, memiliki posisi strategis sebagai lembaga pembiayaan dan penanggung sistem pembayaran bagi pertumbuhan perekonomian nasional, khususnya industri dan perdagangan.

Meningkatnya pembangunan pada aspek perekonomian tidak lepas dari faktor pendanaan untuk membiayai suatu aktifitas ekonomi dalam dunia usaha. Kegiatan pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi baik pemerintah maupun swasta tentunya sangat diperlukan dana dalam jumlah yang tidak kecil. Belakangan ini hampir tidak ada satu kehidupan ekonomi yang tidak bersentuhan dengan bank, khususnya yang berkenaan dengan pendanaan usaha di bidang industri, perdagangan bahkan di bidang kehidupan rumah tangga biasa¹.

Di Indonesia menurut hasil survei Bank Dunia pada tahun 2011 menunjukkan warga Indonesia yang memiliki rekening hanya 19,6% dari sekitar 240 juta penduduk. Survei Badan Pusat Statistik per Maret 2013 menunjukan bahwa 28,1 juta penduduk masih tergolong miskin. Hal ini mengindikasikan bahwa masih banyak rakyat Indonesia yang belum bisa mengakses pelayanan jasa keuangan, karena berbagai macam alasan seperti jarak antara kantor bank dan rumah, sarana transportasi yang kurang memadai ataupun enggan masyarakat ketika mengikuti prosedur di Perbankan². Kendala yang dihadapi dalam memperluas inklusi keuangan secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni kendala yang dihadapi oleh masyarakat dan kendala yang dihadapi oleh lembaga keuangan.

Kendala yang dihadapi masyarakat dalam hal menabung adalah tingkat pemahaman tentang pengelolaan keuangan yang masih kurang dan biaya pembukuan rekening serta biaya administrasi yang bagi sebagian masyarakat

¹ Gunarto Suhardi, **Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum**, Yogyakarta, Kanisius 2003, hlm 175

² Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014 tentang layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif

dinilai cukup memberatkan. Sementara itu dalam hal bentuk pinjaman, hambatan yang dihadapi masyarakat antara lain pemenuhan persyaratan aspek legal formal usaha yang dimiliki, kurangnya informasi mengenai produk perbankan, atau produk yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Belum lagi hambatan hambatan yang terjadi di tingkat lembaga keuangan itu sendiri diantaranya dengan terbatasnya cakupan diberbagai wilayah guna memperluas jaringan kantor, selain itu terbatasnya informasi tentang nasabah potensial dan terbatasnya informasi keuangan konsumen. Di sisi lain guna memperluas jaringan kantor di daerah terpencil, bank dihadapkan pada persoalan biaya pendirian yang relatif mahal. Laku Pandai diharapkan dapat menjembatani kendala tersebut untuk mempermudah layanan perbankan kepada masyarakat khususnya yang jauh dari kantor Bank.³ Dengan demikian diperlukan suatu keterkaitan dengan usaha usaha untuk mewujudkan keuangan inklusif, maka Bank Indonesia telah menetapkan 6 pilar strategi yang meliputi edukasi keuangan, fasilitas keuangan publik, pemetaan informasi keuangan, kebijakan, fasilitas intermediasi dan saluran distribusi serta perlindungan konsumen. Guna mengimplementasikan 6 pilar tersebut, peran perbankan yang menguasai sekitar 80% dari industri keuangan di Indonesia sangat diharapkan, khususnya dalam memajukan layanan keuangan yang bisa dinikmati oleh banyak kalangan masyarakat⁴.

Salah satu program yang ditempuh oleh Bank Indonesia pada pilar pengembangan saluran distribusi adalah Laku Pandai. Secara arti harfiah Laku Pandai adalah pelayanan perbankan tanpa adanya kantor cabang. Penggunaan

³ Rahman. A, *Financial Inclusion as a tool for Combating Poverty : The Bangladesh Approach*, Nairobi

⁴ **Booklet Keuangan Inklusif**, Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM Bank Indonesia, 2014.

agen lebih diutamakan untuk menjangkau masyarakat yang tinggal di daerah terpencil dan dikarenakan keadaan geografis menyebabkan masyarakat enggan ke kota untuk mengunjungi Bank.

Laku Pandai merupakan kegiatan pemberian jasa layanan sistem pembayaran dan keuangan terbatas yang dilakukan tanpa melalui kantor fisik bank, maupun dengan menggunakan sarana teknologi dan/atau jasa pihak ketiga terutama untuk melayani masyarakat yang belum terlayani jasa keuangan. Layanan keuangan yang diberikan melalui Laku Pandai ini adalah layanan sistem pembayaran dan perbankan terbatas yang ditujukan dalam memenuhi kepentingan ekonomi masyarakat *unbanked* dan *underbanked*, seperti pengiriman uang, penyimpanan kelebihan pendapatan, dan memperoleh tambahan dana untuk pembiayaan usaha produktif. Secara umum karakteristik masyarakat yang menjadi target dalam kerangka Laku Pandai yakni memiliki pendapatan relatif kecil, pemahaman sistem keuangan yang kurang, dan tidak/kurang memiliki pengalaman dalam menggunakan jasa/produk perbankan.

Laku Pandai yang dijalankan OJK adalah Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif. Laku Pandai dilaksanakan, didukung, dan dipertanggungjawabkan oleh setiap lembaga jasa keuangan yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga Jasa Keuangan yang dapat mengajukan permohonan menjadi penyelenggara Laku Pandai adalah Bank dan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah⁵. Produk yang disediakan oleh Laku Pandai adalah Tabungan, Kredit atau pembiayaan untuk nasabah mikro, asuransi

⁵ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014 Tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif.

mikro, dan produk keuangan lainnya yang disetujui oleh OJK. Penjelasan atas masing-masing produk layanan laku pandai ialah sebagai berikut :

1. Tabungan dengan karakteristik BSA ialah Tabungan yang memiliki karakteristik antara lain: tanpa batas minimum baik untuk saldo maupun transaksi setor tunai, ada batas maksimum saldo dan transaksi pendebitan rekening (misalnya penarikan tunai) yang ditetapkan oleh Bank namun kedua batas tersebut tidak boleh melebihi batas yang ditetapkan di Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), yaitu untuk saldo setiap saat maksimum Rp20juta dan untuk transaksi debit kumulatif selama sebulan maksimum Rp5juta), tanpa biaya administrasi bulanan dan tidak dikenakan biaya untuk pembukaan dan penutupan rekening, dan transaksi pengkreditan rekening (misalnya penyetoran tunai).
2. Layanan Kredit Mikro dalam layanan Laku Pandai meliputi kredit yang diberikan untuk bidang usaha yang menghasilkan nilai tambah bagi peminjam (produktif) seperti untuk pertanian, perkebunan, mendirikan warung, dan pembiayaan untuk pendidikan tinggi. adapun pihak yang dapat mengajukan kredit mikro ialah semua orang yang telah memiliki tabungan BSA paling singkat 6 bulan, atau dapat kurang dari 6 bulan sepanjang memenuhi pertimbangan tertentu dari bank penyelenggara.
3. Asuransi Mikro dalam layanan Laku Pandai ialah produk asuransi yang ditujukan untuk proteksi masyarakat berpenghasilan rendah, dengan premi yang ringan. misalnya antara lain asuransi kesehatan untuk penyakit demam berdarah dan tipus, asuransi kebakaran, asuransi kecelakaan dan asuransi gempa bumi.

Pelaksanaan Program Laku Pandai, bank penyelenggara melakukan kerjasama dengan agen pelaku. Ada kriteria dan syarat menjadi agen. Untuk menjadi bank penyelenggara juga harus ada aspek yang dipenuhi. Pada laku pandai, agen akan menjadi salah satu kunci sukses Laku Pandai. Keberadaan agen adalah perpanjangan tangan layanan pembayaran, dan perbankan dalam Laku Pandai.

Agen bekerjasama dengan Bank penyelenggara untuk melayani nasabah dan/atau calon nasabah sesuai perjanjian yang meliputi transaksi karakteristik BSA. Kegiatan yang dilakukan agen adalah pembukaan rekening, penyeteroran dan penarikan tunai, pemindahbukuan, pembayaran tagihan, transfer dana, pengecekan saldo, dan/atau penutupan rekening. Transaksi seperti kredit dan pembiayaan kepada nasabah mikro yang meliputi penerimaan dokumen permohonan, penyaluran pencairan dana, penagihan ataupun penerimaan pembayaran angsuran dan/atau pelunasan pokok⁶. Pelaksanaan kegiatan keuangan oleh bank dengan nasabah dilakukan atau diwakili oleh agen. Karena pada prinsipnya agen adalah pihak yang menjalin kerjasama dengan bank atau perusahaan telekomunikasi, yang melewati jasa keuangan pada masyarakat.

Pelayanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif, bank memberikan informasi mengenai kredit atau pembiayaan untuk nasabah mikro kepada agen. Sedangkan penggunaan agen sebagai pihak ketiga untuk bekerjasama melakukan pelayanan Kredit atau Pembiayaan untuk nasabah mikro dengan tujuan utama kredit atau pembiayaan ditujukan untuk membiayai kegiatan usaha yang bersifat produktif dan/atau kegiatan lain dalam rangka mendukung

⁶ *Ibid*

terwujudnya Keuangan Inklusif. Calon debitur dapat mengajukan permohonan kredit dapat dilakukan melalui agen dengan tetap analisis kelayakan dan persetujuan atas permohonan kredit untuk nasabah mikro dilakukan oleh Pihak Bank.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara. Meskipun Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian nasional, namun masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal, dalam hal produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi, permodalan, serta iklim usaha⁷.

Salah satu problema klasik bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Surabaya dalam menjalankan usahanya adalah modal usaha. Kebutuhan modal sangat terasa pada saat seseorang ingin memulai usaha baru. Pada usaha yang sudah berjalan, modal usaha tetap menjadi kendala lanjutan untuk berkembang. Masalah yang menghadang usaha kecil menyangkut kemampuan akses pembiayaan, akses pasar dan pemasaran, tata kelola manajemen usaha kecil serta akses informasi. Kesulitan usaha kecil mengakses sumber-sumber modal karena keterbatasan informasi dan kemampuan menembus sumber modal tersebut. Padahal pilihan sumber modal sangat banyak dan

⁷ Riant Nugroho, **Membangun Entrepreneur Indonesia (Tantangan Manajemen Pemerintahan Jokowi)**, Jakarta, Elex Media Computindo 2015.

beragam, salah satunya dengan pengajuan kredit kepada Bank yang berada disekitar tempat UMKM itu berada. Namun terkadang UMKM mengalami hambatan untuk melakukan proses pengajuan kredit, salah satunya mengenai jaminan yang diminta oleh pihak bank untuk menjamin kredit yang akan diambil serta persyaratan umum seperti UMKM tersebut harus terdaftar dalam Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya.

Peran pemerintah Kota Surabaya dalam pemenuhan kebutuhan modal bagi pelaku UMKM tentu saja tidak hanya terbatas sebagai pihak yang menyediakan informasi belaka kepada pelaku UMKM. Pemerintah Daerah seyogyanya memberikan dukungan yang lebih nyata akan keterbatasan pelaku UMKM dalam hal modal usaha, termasuk yang tidak terbatas pada kebutuhan jaminan sebagai salah satu syarat utama yang dibutuhkan dalam mendapatkan modal tersebut.

Fungsi Otoritas Jasa Keuangan yang utama adalah pada pengaturan dan menjalankan pengawasan kepada bank dalam memberikan pelayanan jasa keuangan secara mikro, maka Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan aturan tentang pengembangan usaha perbankan dalam layanan branchless banking yang termuat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif Nomor 19/POJK.03/2014 yang diundangkan pada tanggal 19 November 2014

Berdasarkan Pasal 8 POJK No. 19/POJK.03/2014 yang berbunyi : “Bank wajib menyalurkan kredit atau pembiayaan produktif kepada nasabah mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) paling sedikit 70% (tujuh puluh

perseratus) dari total portofolio kredit atau pembiayaan untuk nasabah mikro dalam rangka Laku Pandai.” Penyaluran kredit atau pembiayaan produktif kepada nasabah mikro bank BRI Cabang Manukan dituntut untuk menyalurkan minimal 70% dari total portofolio kredit atau pembiayaan untuk nasabah mikro dalam hal laku pandai. Kaitan ini masalah UMKM di Kota Surabaya mengalami hambatan untuk melakukan peminjaman permodalan untuk mengembangkan usahanya, di sisi lain pihak BRI Cabang Manukan Surabaya dituntut untuk memenuhi target yang di berikan OJK melalui peraturan yang dikeluarkannya dengan minimal batas penyaluran kredit bagi nasabah mikro dimana UMKM termasuk dalam nasabah mikro, maka terjadi saling membutuhkan antara UMKM di Kota Surabaya dengan BRI Cabang Manukan. Hambatan-hambatan yang terdapat dalam pemenuhan penyaluran kredit juga membawa dampak tersendiri bagi pihak BRI untuk menyalurkan kredit dimaksud.

Berdasarkan hal tersebut, penulis merasa tertarik untuk mengkaji secara mendalam dan seberapa jauh upaya Bank BRI Cabang Manukan Surabaya dalam menjalankan pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 19/POJK.03/2014., melalui sebuah penelitian lebih lanjut yang berjudul: **“EFEKTIFITAS PENERAPAN PASAL 8 POJK NOMOR 19/POJK.03/2014 TENTANG LAYANAN KEUANGAN TANPA KANTOR DALAM RANGKA KEUANGAN INKLUSIF MENGENAI KEWAJIBAN PENYALURAN KREDIT BAGI UMKM”**.

Tabel 1. Orisinalitas Penelitian

No	Tahun Penelitian	Nama Penelitian dan Asal Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
1	2016	Bimo, Gigih Ario	Penerapan Pasal 3 Ayat (3) Pojk No. 19/Pojk.03/2014 Tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif Mengenai Branchless Banking	1) bagaimana penerapan pasal 3 ayat (3) POJK No.19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Inklusif Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif pada layanan BRI-Link oleh Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang “Kawi” Malang? (2) apa faktor pendukung dan penghambat bagi pelaksanaan layanan BRI-Link pada Bank Rakyat Indonesia Kantor	Penulis disini membahas tentang penerapan pasal 3 ayat (3) POJK No.19/POJK.03/2014 yang mengkhususkan kepada pelayanan BRI-Link yang ada di BRI Cabang Kawi Malang serta membahas tentang faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang ada.

				<p>Cabang “Kawi” Malang dalam menerapkan ketentuan pasal 3 ayat (3) POJK No.19/POJK. 03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif? (3) bagaimana upaya Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang “Kawi” Malang untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan BRI-Link pada penerapan pasal 3 ayat (3) POJK No.19/POJK. 03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam</p>	
--	--	--	--	---	--

				Rangka Keuangan Inklusif?	
--	--	--	--	---------------------------------	--

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas penerapan pasal 8 POJK NO.19/POJK.03/2014 tentang layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif mengenai kewajiban penyaluran kredit bagi UMKM di BRI Cabang Manukan Surabaya?
2. Bagaimana upaya BRI Cabang Manukan Surabaya untuk mengatasi hambatan di dalam penerapan pasal 8 POJK No.19/POJK.03/2014 tentang layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif mengenai kewajiban penyaluran kredit bagi UMKM?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas penerapan pasal 8 POJK NO.19/POJK.03/2014 tentang layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif mengenai kewajiban penyaluran kredit bagi UMKM di BRI Cabang Manukan Surabaya.
2. Untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan dan menganalisa bagaimana upaya BRI Cabang Manukan Surabaya untuk mengatasi hambatan dipenerapan pasal 8 POJK No.19/POJK.03/2014 tentang layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif mengenai kewajiban penyaluran kredit bagi UMKM.

D. Manfaat Penelitian

Memperhatikan tujuan penelitian dimaksud, maka peneliti berharap mempunyai manfaat, diantaranya :

1. Manfaat Teoritis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum perdata mengenai penerapan pasal 8 POJK NO.19/POJK.03/2014 tentang layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif mengenai kewajiban penyaluran kredit bagi nasabah mikro di BRI Cabang Manukan Surabaya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Otoritas Jasa Keuangan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran dan penyempurnaan peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.19/POJK.03/2014 tentang layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif.
- b. Bagi Bank Indonesia, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pengembangan, dan pengambilan kebijakan khususnya kebijakan mengenai layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif.
- c. Bagi Bank, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah masukan, terutama bagi BRI Cabang Manukan Surabaya, dalam upaya

memberikan layanan keuangan yang terbaik dalam penyaluran kredit UMKM.

- d. Bagi Masyarakat atau Nasabah, yaitu dengan adanya penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang laku pandai sebagai penyelenggara penyaluran kredit dalam usaha mikro.

E. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan telah dikemukakan latar belakang masalah yang mendorong penulis untuk memilih judul, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan mengenai penerapan pasal 8 pojk nomor 19/pojk.03/2014 tentang layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif mengenai kewajiban penyaluran kredit bagi umkm di kantor Cabang BRI cabang Manukan Surabaya.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Selanjutnya pada bab kajian pustaka, penulis menguraikan teori-teori yang melandasi penulisan yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penulisan ini diuraikan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, teknik

pengumpulan data, populasi sampling dan responden, alasan pemilihan lokasi penelitian, teknik analisa data, definisi operasional.

BAB IV : PEMBAHASAN

Dalam hal ini penulis memaparkan pembahasan yang berisi jawaban dari rumusan masalah penelitian yang diperoleh secara sistematis berisikan hasil analisis dan pendeskripsian tentang bagaimana efektivitas penerapan pasal 8 POJK NO.19/POJK.03/2014 tentang layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keungan inklusif mengenai kewajiban penyaluran kredit bagi UMKM di BRI Cabang Manukan Surabaya, dengan mendeskripsikan dan menganalisa bagaimana upaya BRI Cabang Manukan Surabaya untuk mengatasi hambatan dipenerapan pasal 8 POJK No.19/POJK.03/2014 tentang layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keungan inklusif mengenai kewajiban penyaluran kredit bagi UMKM.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berupa permuatan tentang kesimpulan dari hasil analisis yang dilakukan oleh penulis tentang bagaimana efektivitas penerapan pasal 8 POJK NO.19/POJK.03/2014 tentang layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keungan inklusif mengenai kewajiban penyaluran kredit bagi UMKM di BRI Cabang Manukan Surabaya, serta saran dari penulis yang dapat diberikan pada pihak-pihak terkait mengenai apa yang harus dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bank Rakyat Indonesia Cabang Manukan dan masyarakat dengan

permasalahan dalam penulisan ini. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi dan bermanfaat menambah pengetahuan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Efektivitas

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemandirian/kemujaraban, berbicara keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu: karakteristik/dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.¹ Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif².

Derajat dari efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa, "taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator suatu berfungsinya suatu sistem hukum. Dan berfungsinya hukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup."³

Beberapa pendapat mengemukakan tentang teori efektivitas seperti Bronislaw Malinowski, Clarence J Dias, Allot dan Murmer. Bronislaw Malinowski

¹ Barda Nawawi Arief, **Kapita Selekta Hukum Pidana**, Bandung, Citra Aditya, ctk Ketiga, 2013, hlm 67

² Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, **Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi**, Edisi Pertama, Jakarta, Rajawali Press, ctk Kesatu, 2013, hlm .375

³ Soerjono Soekanto, **Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi**, Bandung, Remaja Karya, 1985, hlm 7

mengemukakan bahwa teori efektivitas pengendalian sosial atau hukum, hukum dalam masyarakat dianalisa dan dibedakan menjadi dua yaitu: (1) masyarakat modern, (2) masyarakat primitif, masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar yang sangat luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih, didalam masyarakat modern hukum yang di buat dan ditegakan oleh pejabat yang berwenang.⁴

Pandangan lain tentang efektivitas hukum oleh Clarence J Dias mengatakan bahwa⁵ :

An effective legal system may be describe as one in which there exists a high degree of congruence between legal rule and human conduct. Thus and effective legal system will be characterized by minimal disparity between the formal legal system and the operative legal system is secured by :

- a. The intelligibility of it legal system.*
- b. High level public knowledge of the content of the legal rules*
- c. Efficient and effective mobilization of legal rules:*
 - 1) A committed administration and.*
 - 2) Citizen involvement and participation in the mobilization process*
- d. Dispute settlement mechanisms that are both easily accessible to the public and effective in their resolution of disputes and.*
- e. A widely shared perception by individuals of the effectiveness of the legal rules and institutions.*

⁴ Salim H.S dan Erlies Septiani, op.cit., hlm 308.

⁵ Clarence J.Dias, **Research on Legal Service And Poverty: its Relevance to the Design of Legal Service Program in Developing Countries**, Wash. U.L. Q 147 (1975). P. 150

Pendapat tersebut dijelaskan Clerence J Dias dalam Marcus Priyo Guntarto sebagai berikut, terdapat 5 (lima) syarat bagi efektif tidaknya satu sistem hukum meliputi⁶:

1. Mudah atau tidaknya makna isi aturan aturan itu ditangkap.
2. Luas tidaknya kalangan didalam masyarakat yang mengetahui isi aturan-aturan yang bersangkutan.
3. Efisiensi dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum dicapai dengan bantuan aparat administrasi yang menyadari melibatkan dirinya kedalam usaha mobilisasi yang demikian, dan para warga masyarakat yang terlibat dan merasa harus berpartisipasi dalam proses mobilisasi hukum.
4. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus mudah dihubungi dan dimasukkan oleh setiap warga masyarakat, akan tetapi harus cukup efektif menyelesaikan sengketa.
5. Adanya anggapan dan pengakuan yang cukup merata dikalangan warga masyarakat tang beranggapan bahwa aturan-aturan dan pranata –pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya mampu efektif.

Dalam bukunya achmad ali yang dikutip oleh Marcus Priyo Guntarto yang mengemukakan tentang keberlakuan hukum dapat efektif apabila⁷ :

1. Relevansi aturan hukum dengan kebutuhan orang yang menjadi target
2. Kejelasan dari rumusan substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh orang yang menjadi target hukum

⁶ *Ibid*

⁷ Marcus Priyo Gunarto, **Kriminalisasi dan Penalisisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi**, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2011, hlm 71-71, dikutip Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbaini, Op.Cit., hlm 308

3. Sosialisasi yang optimal kepada semua orang yang menjadi target hukum.
4. Undang-undang sebaiknya bersifat melarang, bukan bersifat mengharuskan.
Pada umumnya hukum prohibitor lebih mudah dilaksanakan daripada hukum mandatur.
5. Sanksi yang akan diancam dalam undang-undang harus dipadankan dengan sifat undang-undang yang dilanggar, suatu sanksi yang tepat untuk tujuan tertentu, mungkin saja tidak tepat untuk tujuan lain. Berat sanksi yang diancam harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa dalam sosiologi hukum masalah kepatuhan atau ketaatan hukum terhadap kaidah-kaidah hukum pada umumnya telah menjadi faktor yang pokok dalam mengukur efektif tidaknya sesuatu yang ditetapkan dalam hukum ini.⁸

Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Anthoni Allot sebagaimana dikutip Felix adalah sebagai berikut⁹: Hukum akan mejadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegelapan maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikan.

Keberlakuan hukum berarti bahwa orang bertindak sebagaimana seharusnya sebagai bentuk kepatuhan dan pelaksana norma jika validitas adalah

⁸ Soerjono Soekanto, **Sosiologi Suatu pengantar**, Bandung, Rajawali Pers, 1996, hlm 20

⁹ Salim H.S dan Erlis Septiana Nurbani, Op.cit, hlm 303

kualitas hukum, maka keberlakuan adalah kualitas perbuatan manusia sebenarnya bukan tentang hukum itu sendiri¹⁰. Selain itu William Chambliss dan Robert B. Seidman mengungkapkan bahwa bekerjanya hukum dimasyarakat dipengaruhi oleh all other societal personal force (semua ketakutan dari individu masyarakat) yang melingkupi seluruh proses¹¹.

Studi efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan antara realitas hukum dan ideal hukum, secara khusus terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan (law in action) dengan hukum dalam teori (law in theory) atau dengan kata lain kegiatan ini akan memperlihatkan kaitannya antara law in the book dan law in action¹². Bustanul Arifin yang dikutip oleh Raida L. Tobing dkk, mengatakan bahwa dalam negara yang berdasarkan hukum, berlaku efektifnya sebuah hukum apabila didukung oleh tiga pilar, yaitu¹³:

1. Lembaga atau penegak hukum yang berwibawa dapat diandalkan.
2. Peraturan hukum yang jelas sistematis.
3. Kesadaran hukum masyarakat tinggi.

¹⁰ Hans Kelsen, **General Theory of Law and State**, Translated by Anders Wedberg, New York: Russell and Russell, 1991, dikutip dari Jimly Ashidique dan M. Ali Safa'at, **Teori Hans Kelsen Tentang Hukum**, Jakarta, Konstitusi Press, ctk. Kedua, 2012, hlm 39-40

¹¹ Robert B. Seidman, **Law order and Power**, Addition Publishing Company Wesley Reading massachusetts, 1972, hlm 9-13

¹² Soleman B. Taneko, **Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat**, Jakarta, Rajawali Press, 1993, hlm 47-48.

¹³ Raida L. Tobing, dkk, (Hasil Penelitian), **Efektivitas Undang-Undang Money Laundering**, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI, 2011, hlm 11

B. Kajian Umum Tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Atau Laku Pandai

1. Definisi Layanan Keuangan Tanpa Kantor

Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif atau Laku Pandai adalah salah satu program yang digunakan pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan meningkatkan akses dan pengetahuan serta kemudahan layanan keuangan dalam jasa perbankan. Berbagai organisasi dunia mencoba mendefinisikan arti dari laku pandai. Seperti *Consultative Group to Assist the Poor (CGAP)* memberikan deifinisi, yaitu *“Branchless Banking as the delivery of financial service outside convebtional bank braches using information and communications technologies and retail Agent”*¹⁴. Artinya laku pandai adalah pemberian jasa keuangan yang dilakukan diluar kantor cabang bank konvensional dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi serta agen ritel.

Arti lain dari laku pandai adalah pemberian layanan keuangan di luar cabang bank konvensional, yang sering menggunakan agen dan mengandalakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengirimkan rincian transaksi, biasanya menggunakan ponsel. Sehingga berpotensi untuk mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh konsumen dan memberikan kenyamanan kepada konsumen.¹⁵

Di indonesia, Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif disingkat Laku Pandai, yang berarti kegiatan menyediakan layanan perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya yang dilakukan tidak

¹⁴ **Brazil Notes On regulations Branchless Banking**, CGAP, 2008

¹⁵ **CGAP, Branchless Banking Diagnostic Template**, CGAP, February 2010.

melalui jaringan kantor, namun melalui kerjasama dengan pihak lain dan perlu didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi.¹⁶

2. Penyelenggara Laku Pandai

Penyelenggara Laku Pandai, menurut POJK Nomer 19/POJK.03/2014 Tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif, adalah semua lembaga jasa keuangan. Lembaga jasa keuangan adalah lembaga yang melakukan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga jasa keuangan yang dimaksud antara lain :¹⁷

- a. Bank
- b. Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah
- c. Lembaga Jasa Keuangan Lainnya

Lembaga jasa keuangan lainnya yang dimaksud dalam POJK Nomer 19/POJK.03/2014 Tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif antara lain :

- a. Pasar Modal
- b. Dana Pensiunan
- c. Lembaga Pembiayaan
- d. Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (pegadaian, lembaga penjamin, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dan

¹⁶ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomer 19/POJK.03/2014 Tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif Pasal 1 ayat 3.

¹⁷ *Ibid*

masyarakat yang bersifat wajib, meliputi penyelenggaraan program jaminan sosial, pensiun, dan kesejahteraan yang diawasi OJK)

3. Produk Laku Pandai

Untuk mewujudkan tujuannya, Laku Pandai mempunyai produk yang disediakan untuk masyarakat, antara lain :¹⁸

a. Tabungan

Tabungan, menurut UU No. 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet, giro, dan ataulat lainnya yang dipesamakan dengan itu. Dalam laku Pandai, tabungan harus memiliki karakteristik yang disebut *Basic Saving Account* (BSA). Karakteristik BSA antara Lain :¹⁹

- 1) Hanya dapat dimiliki oleh perorangan warga negara Indonesia
- 2) Dalam mata uang Rupiah
- 3) Tanpa batas minimum setoran
- 4) Tanpa batas minimum saldo rekening
- 5) Batas maksimum saldo rekening setiap saat ditetapkan paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
- 6) Batas maksimum transaksi debet rekening berupa penarikan tunai, pemindahbukuan dan/atau transfer keluar dalam 1 bulan secara kumulatif pada setiap rekening paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)

¹⁸ *Ibid*, Pasal 4

¹⁹ *Ibid*, Pasal 5 ayat 2

- 7) Batas maksimum transaksi debet rekening sebagai mana dimaksud diatas dapat ditetapkan Bank lebih besar dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dalam satu bulan, namun tidak boleh lebih besar dari Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dalam 1 tahun secara kumulatif, dalam hal nasabah juga merupakan debitur Bank
- 8) Dibebaskan dari pembebanan biaya untuk :
 - a) Administrasi Bulanan
 - b) Pembukaan rekening
 - c) Transaksi penyetoran tunai
 - d) Transaksi transfer masuk
 - e) Transaksi pemindah bukuan
 - f) Penutupan rekening
- 9) Biaya untuk transaksi tarik tunai, transfer keluar, pembayaran melalui rekening tabungan dan biaya lain ditetapkan oleh Bank dan harus lebih sedikit dari biaya transaksi serupa untuk rekening tabungan reguler
- 10) Mendapatkan bunga atau bagi hasil mulai dari saldo rekening Rp 1,00 (satu rupiah)
- 11) Tidak diperkenankan untuk rekening bersama dengan status “dan/atau”

Tabungan dengan karakteristik BSA hanya diberikan kepada nasabah yang belum mempunyai tabungan lainya. Jadi jenis tabungan ini peruntukan pemula dan dapat di buat melalui agen.²⁰ Apabila saldo pada

²⁰*Ibid*, Pasal 5 Ayat 3

tabungan BSA nihil dan/atau tidak ada transaksi selama 6 bulan berturut-turut, status tabungan dapat dirubah menjadi rekening tidur. Prosedur lanjutan ditetapkan oleh bank yang bersangkutan.²¹

Selain itu penerbitan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) serta kartu debit bisa dilakukan, apabila dengan permohonan dari nasabah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan layanan keuangan sesuai kebutuhan nasabah.²²

b. Kredit atau Pembiayaan Untuk Nasabah Mikro

Kredit atau pembiayaan nasabah mikro dapat diberikan kepada nasabah tabungan BSA apabila calon debitur telah menjadi nasabah paling singkat 6 bulan. Jikalau calon debitur yang menjadi nasabah kurang dari 6 bulan, Bank berhak menentukan apakah akan memberi kredit atau tidak. Kredit yang diberikan hanya untuk membiayai kegiatan usaha yang produktif dan/atau kegiatan yang sejenis dalam rangka mewujudkan Keuangan Inklusif.²³

Kredit atau pembiayaan untuk nasabah mikro paling lama berjangka waktu 1 tahun. Jangka waktu kredit dapat lebih dari 1 tahun sepanjang sesuai siklus usaha debitur. Seperti ternak sapi, tanaman yang mempunyai masa panen lama, dan sebagainya. Batas nominal kredit paling banyak sebesar RP 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)²⁴

²¹ *Ibid*, Pasal 5 Ayat 6

²² *Ibid*, Pasal 5 Ayat 7

²³ *Ibid*, Pasal 6 Ayat 1

²⁴ *Ibid*, Pasal 6 Ayat 2

Pengajuan permohonan dapat dilakukan melalui counter bank ataupun agen yang mewakili bank penyelenggara. Agen hanya berfungsi sebagai penyalur serta memberikan semua informasi yang dibutuhkan nasabah, karena persetujuan akan permohonan kredit tetap dilakukan oleh pihak bank. Pencairan kredit dilakukan melalui rekening nasabah tabungan BSA yang mengajukan atau melalui rekening pihak penyedia kebutuhan usaha nasabah yang mengajukan seperti penyedia pupuk dan/atau benih untuk petani, dan sebagainya.²⁵

c. Asuransi Mikro

Asuransi mikro sama dengan asuransi pada umumnya, akan tetapi obyek tujuan dari asuransi mikro adalah masyarakat dengan penghasilan rendah.²⁶

d. Produk Keuangan Lainnya Berdasarkan Persetujuan OJK

C. Kajian Umum Tentang Keuangan Inklusif

1. Definisi Keuangan Inklusif

Keuangan inklusif atau dalam bahasa Inggris disebut *finance inclusion* merupakan sebuah skema pembiayaan inklusif dengan tujuan utama memberikan berbagai layanan keuangan kepada kalangan miskin dan berpenghasilan rendah. Menurut Brigit Helms, kata ini bersinonim dengan frasa *inclusive finance system*²⁷, yang berarti sistem jasa layanan keuangan yang bersifat universal dan

²⁵ *Ibid*, Pasal 7

²⁶ *Ibid*, Pasal 9

²⁷ Brigit Helms, *Access For All : Building Inclusive Financial System*, Wasington, DC, The World Bank, 2006, hlm 2

noneklusif, dan mempunyai visi untuk menciptakan satu sistem jasa keuangan yang mampu menjangkau semua kalangan, baik yang berpenghasilan besar maupun yang berpenghasilan kecil. Ragam layanan keuangan antara lain berupa kredit permodalan, tabungan, asuransi, serta transfer keuangan.

Banyak institusi yang mencoba mendefinisikan tentang keuangan inklusif. Perserikatan Bangsa-Bangsa mendefinisikan *financial inclusion* adalah pelayanan berbagai jasa keuangan, dengan biaya yang rasional untuk orang-orang yang belum terjamah bank serta masyarakat yang melakukan usahanya di daerah pedesaan, seperti pertanian dan peternakan. Layanan berupa tabungan, kredit jangka pendek dan jangka panjang, hipotek, sewa guna usaha, asuransi, pensiunan, transfer, dan pembayaran²⁸.

Sedangkan Menurut *Rangarajan Committe*, *financial inclusion* adalah cara untuk mengetahui dan memastikan apakah kaum miskin serta masyarakat dengan penghasilan rendah telah mendapatkan layanan keuangan seperti kredit dengan biaya pengembalian yang wajar²⁹. Menurut *House of Commonc Treasury Committee*, *financial inclusion* adalah kemampuan masyarakat untuk mengakses prosudk jasa keuangan sesuai dengan tingkat kebutuhan. Kemampuan yang ditinjau biasanya seperti pengetahuan tentang bank, jaringan perbankan, fasilitas dalam dunia perbankan, serta keuntungan penggunaan jasa perbankan.

Menurut CGAP-GPFI, keuangan inklusif adalah “ *state in which all working age adults have an effective access to credit, savings, payments, and insurance from formal service providers. Effective access involves convenient and*

²⁸ United Nations, *Building Inklusif Financial Sectors For Development*, New York, The United Nations Department Of Public Information, 2006

²⁹ Ezazul Islam dan Salim Al Mamun, *Financial Inclusion, The Role Of Bangladesh Bank*, Dhaka, Research Department Bangladesh Bank Office. 2011

responsible service delivery, at a cost affordable to the customers use formal financial service rather than existing informal options”³⁰. Artinya keadaan dimana semua melakukan kredit, penyimpanan, pembayaran, dan jaminan dari penyedia jasa formal, yang melibatkan layanan yang nyaman dan bertanggungjawab, dengan biaya yang terjangkau bagi konsumen dan berkelanjutan untuk penyedia layanan dengan hasil, konsumen lebih memilih menggunakan jasa finansial resmi daripada jasa yang tidak resmi.

FATF mendefinisikan keuangan inklusif adalah *“financial inclusion involves providing access to an adequate range of safe, convenient and affordable financial services to disadvantaged and other vulnerable groups, including low income, rural and undocumented persons, who have been underserved or excluded from the formal financial sector”*³¹. Yang berarti keuangan inklusif melibatkan penyedia jasa keuangan dengan akses yang memadai, aman, nyaman, dan terjangkau untuk kelompok yang tidak diuntungkan dan kelompok rentan lainnya, termasuk yang berpenghasilan rendah, orang-orang pedesaan, yang tidak mendapatkan pelayanan dari jasa pelayanan formal.

Bank Indonesia dalam strategi Nasional Keuangan Inklusif mendefinisikan bahwa keuangan inklusif mempunyai arti “Hak setiap orang untuk memiliki akses dan layanan penuh dari lembaga keuangan secara tepat waktu, nyaman, informatif dan terjangkau biayanya, dengan penghormatan penuh kepada harkat dan martabatnya. Layanan keuangan tersedia bagi seluruh segmen

³⁰ <http://www.bi.go.id/id/perbankan/keuanganinklusif/Indonesia/Contents/Default.aspx>
(diakses tanggal 11 januari 2018)

³¹ *ibid*

masyarakat, dengan perhatian khusus kepada orang miskin, orang miskin produktif, pekerja, migran, dan penduduk di daerah terpencil”³²

2. Tujuan Keuangan Inklusif

Secara umum tujuan dari keuangan inklusif adalah untuk meningkatkan dan meratakan perekonomian rakyat, terutama bagi kalangan yang kurang mampu atau berpenghasilan rendah. Visi nasional keuangan inklusif dirumuskan sebagai berikut “Mewujudkan sistem keuangan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, pemerataan pendapatan dan terciptanya stabilitas sistem keuangan di Indonesia”. Visi ini dijabarkan dalam beberapa tujuan, antara lain :³³

- a. Menjadikan strategi keuangan inklusif sebagai bagian dari strategi besar pembangunan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, pemerataan pendapatan dan stabilitas sistem keuangan.
- b. Menyediakan jasa dan produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- c. Meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai layanan keuangan.
- d. Meningkatkan akses masyarakat ke layanan keuangan
- e. Memperkuat sinergi antara bank, lembaga keuangan mikro, dan lembaga keuangan non bank.
- f. Mengoptimalkan peran teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memperluas cakupan layanan keuangan.

³² **Booklet Keuangan Inklusif**, Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM Bank Indonesia, 2014, hlm 6

³³ Ibid hlm 6

Menurut Puhashendhi³⁴, sistem layanan keuangan inklusif memberikan manfaat pada masyarakat . yang pertama, soal akses. Akses yang dimaksud adalah akses menuju kredit, sehingga masyarakat kecil dapat dimanfaatkan untuk membuka usaha baru dan bagi yang telah memiliki usaha dapat meningkatkan jumlah investasi. Kedua, terbukanya kesempatan masyarakat untuk mengetahui dan menggunakan berbagai produk jasa keuangan seperti kredit untuk usaha, tabungan untuk menabung, dan asuransi. Ketiga, pengurangan biaya ke sektor informal yang biasanya mempunyai bunga tinggi dan waktu pembayaran yang tidak masuk akal dikarenakan masyarakat akan lebih condong untuk memilih melakukan kredit di sektor formal, apalagi jika prosedur yang diperlukan tidak terlalu susah. Keempat, jika masyarakat kecil sudah menabung, tabungan yang sudah terdaftar di sektor formal dapat digunakan untuk pembayaran seperti listrik, air, dan lain-lain. Sehingga mempermudah masyarakat untuk melakukan pembayaran ke berbagai sektor.

3. Cara Mewujudkan Keuangan Inklusif

Dalam mewujudkan keuangan inklusif, diperlukan strategi dan perencanaan yang matang. Sehingga cita-cita mewujudkan keuangan inklusif tidak berhenti ditengah jalan. Menurut Bank Indonesia, ada 6 pilar untuk mewujudkan keuangan inklusif, antara lain :³⁵

a. Edukasi Keuangan.

Bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat luas tentang produk-produk dan jasa-jasa keuangan yang ada dalam pasar

³⁴ Puhashendhi Mehrotra, et al., **Financial Inclusion-An Overview**, Occasional Paper 48, Mumbai, Departmen of Economic Analysis and Research, National Bank for Agriculture adn Rural Development, 2009.

³⁵ **Booklet Keuangan Inklusif**, Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM Bank Indonesia. 2014, hlm 11.

keuangan formal, aspek perlindungan konsumen dan pemahaman manajemen risiko.

b. Fasilitas Keuangan Publik.

Strategi pada pilar ini mengacu pada kemampuan dan peran pemerintah dalam penyediaan pembiayaan keuangan publik baik secara langsung maupun bersyarat guna mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat.

c. Pemetaan Informasi Keuangan.

Bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat terutama yang sebenarnya dikategorikan tidak layak untuk menjadi layak atau dari unbankable menjadi bankable oleh institusi keuangan normal, terutama kaum miskin produktif serta usaha mikro kecil.

d. Kebijakan/Peraturan yang mendukung.

Pelaksanaan program keuangan inklusif membutuhkan dukungan kebijakan baik oleh pemerintah maupun Bank Indonesia guna meningkatkan akses akan layanan jasa keuangan.

e. Fasilitas Intermediasi dan Saluran Distribusi.

Bertujuan untuk meningkatkan kesadaran lembaga keuangan akan keberadaan segmen potensial di masyarakat dan memperluas jangkauan layanan jasa keuangan dengan memanfaatkan metode distribusi alternatif.

f. Perlindungan Konsumen.

Bertujuan agar masyarakat memiliki jaminan rasa aman dalam berinteraksi dengan institusi keuangan dalam memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan yang ditawarkan

D. Kajian Umum Kredit

1. Definisi Kredit

Dalam bahasa latin kredit disebut “*Credere*” yang artinya percaya. Maksudnya si pemberi kredit percaya kepada si penerima kredit, bahwa kredit yang di salurkan pasti akan di kembalikan sesuai perjanjian.³⁶ Pengertian kredit menurut Undang-Undang Perbankan nomor 10 tahun 1998, “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.³⁷

Ikatan Akuntan Indonesia mendefinisikan kredit sebagai berikut: Kredit adalah pinjaman uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan. Hal yang termasuk dalam pengertian kredit yang diberikan adalah kredit dalam rangka pembiayaan bersama, kredit dalam restrukturisasi, dan pembelian surat berharga nasabah yang dilengkapi dengan Note Purchase Agreement (NPA).

Dari pengertian di atas dapatlah dijelaskan bahwa kredit dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang. Kemudian adanya kesepakatan antara bank sebagai kreditur dan nasabah penerima kredit sebagai debitur, dengan perjanjian yang telah dibuat. Dalam perjanjian kredit tercakup hak

³⁶ Kasmir, **Dasar-Dasar Perbankan**, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2005, hlm 101

³⁷ Hermansyah, **Hukum Perbankan Nasional Indonesia**, Jakarta, PT. Kencana, 2005, cet. Ke-5, hlm 57

dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan bersama. Demikian pula dengan masalah sanksi apabila debitur ingkar janji terhadap perjanjian yang telah dibuat.³⁸

2. Unsur Pemberian Kredit

Pemberian kredit oleh perbankan mengandung beberapa unsur, yaitu³⁹ :

- a. Kepercayaan, Keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (baik berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang sesuai jangka waktu kredit.
- b. Kesepakatan, yaitu kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit yang dituangkan dalam Suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.
- c. Jangka waktu, Masa pengembalian kredit yang telah disepakati bersama. jangka waktu tersebut dapat berupa jangka waktu yang pendek, menengah ataupun jangka panjang.
- d. Risiko, Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit.
- e. Balas jasa, Keuntungan atas pemberian suatu kredit atau pembiayaan yang dikenal sebagai bunga untuk bank konvensional atau bagi hasil untuk bank syariah.

3. Tujuan Dan Fungsi Kredit

Dalam prakteknya Tujuan penyaluran kredit, antara lain adalah untuk :

³⁸ <http://ssbelajar.blogspot.com/2013/04/pengertian-dan-jenis-jenis-kredit.html>
tanggal 11 Januari 2018)

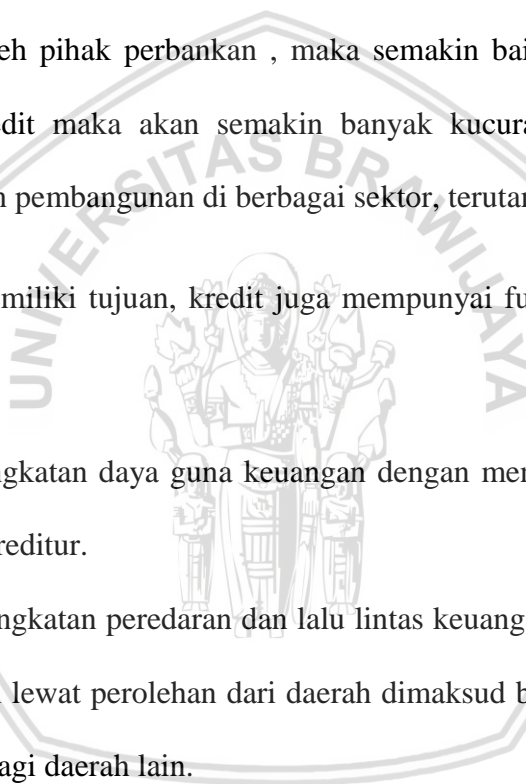
³⁹ *Ibid*, hlm 103

(diakses

- a. Mencari keuntungan. Hasil keuntungan yang di peroleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang di bebaskan kepada nasabah. Keuntungan yang penting untuk kelangsungan bank itu sendiri, dan juga dapat membesarkan usaha bank.
- b. Membantu usaha nasabah, yaitu membantu nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk berinvestasi maupun dana untuk modal kerja.
- c. Membantu pemerintah. Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang di salurkan oleh pihak perbankan , maka semakin baik mengingat semakin banyak kredit maka akan semakin banyak kucura dana dalam rangka peningkatan pembangunan di berbagai sektor, terutama sektor riil.

Selain memiliki tujuan, kredit juga mempunyai fungsi yang sangat luas antara lain;

- a. Guna peningkatan daya guna keuangan dengan menghasilkan barang dan jasa oleh Kreditur.
- b. Untuk peningkatan peredaran dan lalu lintas keuangan suatu daerah, maka permodalan lewat perolehan dari daerah dimaksud bisa menjadi tambahan keuangan bagi daerah lain.
- c. Guna peningkatan daya guna keuangan berupa kredit yang diberikan bank yang dapat dipakai debitur untuk mengolah barang yang semula tidak berguna menjadi bermanfaat.
- d. Peningkatan peredaran keuangan. Lewat Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari dan untuk satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar semakin bertambah.



4. Jenis-Jenis Kredit

Secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain:

a. Segi Kegunaan

- 1) kredit investasi, merupakan kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi,
- 2) kredit modal kerja, merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya,

b. Segi Tujuan Kredit

- 1) Kredit produktif, adalah kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi.
- 2) kredit konsumtif, adalah kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi.
- 3) Kredit perdagangan, adalah kredit yang diberikan kepada pedagang dan digunakan untuk membiayai aktivitas usahanya, seperti untuk pembelian barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari putaran hasil penjualan barang dagangan tersebut.

c. Segi Jangka Waktu

- 1) kredit jangka pendek, merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun, dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja,
- 2) kredit jangka menengah, merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kredit berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun, dan biasanya kredit ini digunakan untuk melakukan investasi,

- 3) kredit jangka panjang, merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya di atas 3 dan atau 5 tahun,

d. Segi Jaminan

- 1) kredit dengan jaminan, merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut tidak berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi minimal senilai jaminan atau jaminan tersebut harus melebihi jumlah kredit yang diajukan si calon debitur,
- 2) kredit tanpa jaminan, merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter, serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama berhubungan dengan bank atau pihak lain.

e. Segi Penarikan

- 1) kredit dengan penarikan sekaligus, yaitu kredit yang ditarik nasabah sesuai dengan permohonan kredit yang diajukan secara keseluruhan tanpa ada penundaan pencairan dana pinjaman,
- 2) kredit dengan penarikan bertahap, yaitu kredit yang ditarik nasabah, dimana pencairan dananya dilakukan secara berkala oleh pihak bank.

f. Segi Sifat Pelunasan

- 1) kredit yang pelunasannya dengan angsuran, yaitu kredit yang diperoleh debitur dapat dicicil dalam pelunasannya sesuai dengan ketentuan dan ikatan kerjasama yang telah disepakati oleh bank dengan debitur,

- 2) kredit yang pelunasannya tanpa angsuran, yaitu pembayaran secara keseluruhan terhadap kredit yang diperoleh debitur tanpa adanya cicilan, dimana dalam pelunasan kredit tersebut harus terdapat bunga pinjaman sesuai dengan kesepakatan.

g. Segi Sektor Usaha

- 1) kredit pertanian,
- 2) kredit peternakan,
- 3) kredit industri,
- 4) kredit pertambangan,
- 5) kredit pendidikan,
- 6) kredit profesi,
- 7) kredit perumahan,
- 8) Sektor-sektor lain-lainnya

5. Prosedur Pemberian Kredit

a. Pengajuan Permohonan/Aplikasi Kredit

Guna memperoleh kredit dari Bank, maka tahap pertama yang dilakukan, yaitu mengajukan permohonan/aplikasi kredit kepada Bank yang bersangkutan. Permohonan/Aplikasi kredit tersebut harus dilampiri dengan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan.⁴⁰ Dalam pengajuan permohonan/aplikasi kredit oleh perusahaan sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:

- 1) Profil perusahaan beserta pengurusnya
- 2) Tujuan dan manfaat kredit

⁴⁰

Hermansyah, *Ibid.* hlm 60

- 3) Besarnya kredit dan jangka waktu pelunasan kredit
- 4) Cara pengembalian kredit
- 5) Agunan atau jaminan kredit

Permohonan/aplikasi kredit tersebut dilampirkan dengan dokumen-dokumen pendukung dipersyaratkan yaitu:

- a. Akta pendirian perusahaan
- b. Identitas (KTP) para pengurus
- c. Tanda daftar perusahaan
- d. Nomor pokok wajib pajak
- e. Neraca dan laporan rugi laba (3 tahun terakhir)
- f. Foto copy sertifikat yang dijadikan jaminan

Sedangkan untuk permohonan atau aplikasi kredit bagi perseorangan adalah sebagai berikut :

- 1) Mengisi aplikasi kredit yang telah disediakan oleh bank
- 2) Tujuan dan mamfaat kredit
- 3) Besarnya kredit dan jangka waktu pelunasan kredit
- 4) Cara pengembalian kredit
- 5) Agunan atau jaminan kredit (kalau diperlukan)

Permohonan/aplikasi kredit tersebut dilengkapi dengan melampirkan semua dokumen pendukung yang dipersyaratkan, yaitu :

- 1) Foto copy identitas (KTP)
- 2) KK

3) Slip gaji yang bersangkutan

b. Pemeriksaan berkas

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas pinjaman yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau cukup maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas waktu tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangannya, maka sebaiknya permohonan kredit dibatalkan saja.⁴¹

c. Penilaian Kelayakan Kredit

- a. Aspek Hukum, adalah penilaian terhadap keaslian dan keabsahan dokumen-dokumen yang diajukan oleh pemohon kredit. Penilaian terhadap dokumen-dokumen tersebut dilakukan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang untuk itu.
- b. Aspek Pasar dan Pemasaran, adalah prospek usaha yang dijalankan oleh pemohon kredit untuk masa sekarang dan akan datang.
- c. Aspek Keuangan, adalah aspek keuangan perusahaan yang dilihat dari laporan keuangan yang termuat dalam neraca dan laporan laba rugi yang dilampirkan dalam aplikasi kredit.
- d. Aspek Teknis/Operasional, adalah aspek teknis atau operasional dari perusahaan yang mengajukan aplikasi kredit, misalnya mengenai lokasi tempat usaha, kondisi gedung beserta sarana, dan prasarana pendukung lainnya.

⁴¹ <http://wirmanvalkinz.blogspot.com/2013/09/kumpulan-makalah-manajemen-keuangan.html> (Diakses tanggal 11 Januari 2018)

- e. Aspek Manajemen, adalah untuk menilai pengalaman dari perusahaan yang memohon kredit dalam mengelola kegiatan usahanya, termasuk sumber daya manusia yang mendukung kegiatan usaha tersebut.
- f. Aspek Sosial Ekonomi, adalah untuk melakukan penilaian terhadap dampak dari kegiatan usaha yang dijalankan oleh perusahaan yang memohon kredit khususnya bagi masyarakat baik secara ekonomis maupun sosial.
- g. Aspem AMDAL, penilaian terhadap aspek AMDAL ini sangat penting karena merupakan salah satu persyaratan pokok untuk dapat beroperasinya suatu perusahaan.
- d. Wawancara I
Merupakan penyelidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam.
- e. On the Spot
Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai obyek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasilnya dicocokkan dengan hasil wawancara I.
- f. Wawancara II
Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan pada saat setelah dilakukan on the spot di lapangan.
- g. Penilaian dan analisis kebutuhan Kredit
Merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka menilai kebutuhan kredit yang sebenarnya.
- h. Keputusan Kredit

Keputusan kredit dalam hal ini adalah menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima, maka dipersiapkan administrasinya.

Biasanya mencakup:

- 1) jumlah uang yang diterima
- 2) jangka waktu
- 3) dan biaya-biaya yang harus dibayar

i. Penandatanganan akad kredit/perjanjian lainnya

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit.

j. Realisasi kredit

Diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

k. Penyaluran/penarikan

Adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit yaitu

- 1) sekaligus atau
- 2) secara bertahap.

6. Jaminan Kredit

Kredit tanpa jaminan sangat membahayakan bank, mengingat jika nasabah mengalami suatu kemacetan maka akan sulit untuk menutupi kerugian

terhadap kredit yang disalurkan. Sebaliknya dengan jaminan kredit relative lebih aman mengingat setiap kredit macet akan dapat ditutupi oleh jaminan tersebut.⁴²

a. Kredit Dengan Jaminan

1) Jaminan benda berwujud

- a) Tanah
- b) Bangunan
- c) Kendaraan bermotor
- d) Mesin-mesin atau peralatan
- e) Barang dagangan
- f) Tanaman/kebun/sawah

2) Jaminan benda tidak berwujud

- a) Sertifikat saham
- b) Sertifikat obligasi
- c) Sertifikat tanah
- d) Sertifikat deposito
- e) Wesel
- f) Surat tagihan

3) Jaminan orang

Yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang yang menyatakan kesanggupan untuk menanggung segala resiko apabila kredit tersebut macet.

b. Kredit Tanpa Jaminan

⁴²

Hermansyah, *Ibid.* hlm 113

Yaitu bahwa kredit yang diberikan bukan dengan jaminan barang tertentu. Biasanya kredit ini diberikan untuk perusahaan yang memang benar-benar bonafit dan professional, sehingga kemungkinan kredit tersebut macet sangat kecil.

7. Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Dalam dunia perbankan prinsip pemberian kredit dikenal dengan konsep 5 C, yaitu:⁴³

a. character (watak),

Penilaian terhadap personalitas debitur, bagaimana sifatnya, kejujurannya, rajin, masa kerja debitur pada tempat pekerjaan terakhir, usia debitur, dan lain-lain. Watak calon debitur juga dapat diketahui dengan melihat kelancaran pembayaran kredit di masa lalu jika ada, sedangkan untuk nasabah non-kredit, wataknya dapat diketahui dengan melihat kebiasaan setor/tarik, kualitas giro yang disetor atau apakah nasabah pernah membuka giro kosong.

b. capacity (kapasitas),

Kemampuan calon debitur untuk membayar, di mana diteliti mengenai pendidikan dan pengalaman usahanya, reputasi perusahaan, riwayat usaha, keahliannya dalam bidang usaha tersebut sehingga bank mempunyai keyakinan bahwa suatu usaha yang dibiayai dengan kredit tersebut dikelola oleh orang-orang yang tepat. Analisis kredit akan melihat bagaimana kemampuan calon debitur dalam menghasilkan laba, kemampuan membiayai kegiatan operasional sehari-hari, dan memenuhi kewajiban kredit. Aspek pemasaran meliputi harga pokok, pengelolaan, penagihan. Aspek pembelian terutama untuk sektor bisnis

⁴³ *Op.cit.* <http://wirmanvalkinz.blogspot.com/2013/09/kumpulan-makalah-manajemen-keuangan.html>

manufaktur dan perdagangan meliputi jumlah pembelian per bulan, besarnya pembelian tunai, porsi dan lama kredit pemasok, fluktuasi pemasok, fluktuasi pasokan, dan melihat kualitas hubungan calon debitur dengan pemasok.

c. capital (modal),

Meneliti besar kecilnya modal dan bagaimana pendistribusian modal, apakah ada modal yang cukup untuk menggerakkan sumber daya secara efektif, apakah pengaturan modal kerja baik, sehingga perusahaan berjalan lancar, berapa besar modal kerja, perlu pula dinilai sumber dan struktur permodalan, tingkat pertumbuhan laba, di mana semua ini dapat dilihat pada laporan keuangan perusahaan.

d. Collateral (jaminan),

Jaminan yang diberikan oleh calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik, jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan, jaminan juga harus diteliti keabsahan dan kesempurnaannya sehingga jika terjadi suatu masalah maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

e. Condition (kondisi).

Kondisi ekonomi social dan politik yang ada sekarang dan diprediksi untuk dimasa yang akan datang. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relative kecil.

E. Kajian Umum UMKM

1. Definisi UMKM

Undang Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah angka 8 menyatakan Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan diberbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.

Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pengertian usaha dalam UMKM adalah perusahaan, yang dapat berskala mikro, kecil, dan menengah :

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini

- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

2. Azas UMKM

Asas diberdayakan dan dikembangkannya usaha mikro, kecil, dan menengah adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang Undang No. 20 Tahun 2008, yaitu berasaskan:

- a. kekeluargaan;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kebersamaan;
- d. efisiensi berkeadilan;
- e. berkelanjutan;
- f. berwawasan lingkungan;
- g. kemandirian;
- h. keseimbangan kemajuan; dan

- i. kesatuan ekonomi nasional.

3. Prinsip UMKM

Prinsip pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dicanangkan oleh UU No. 20 Tahun 2008 adalah :

- a. penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
- b. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
- c. pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- d. peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
- e. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu

4. Tujuan UMKM

Tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang diharapkan dapat diwujudkan adalah :

- a. mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
- c. meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian¹. Untuk membahas permasalahan yang terdapat dalam skripsi ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris. Jenis penelitian yuridis empiris adalah cara prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti terhadap data primer lapangan. Pengertian lainnya mengenai yuridis empiris yang lebih lanjut adalah untuk memahami kondisi dan situasi sosial masyarakat dimana hukum itu diterapkan².

Alasan peneliti memilih jenis penelitian yuridis empiris yaitu dalam pembahasan mengenai efektivitas penerapan layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif mengenai kewajiban penyaluran kredit bagi UMKM di BRI Cabang Manukan Surabaya sudah terlaksana, akan tetapi upaya pemenuhan Pasal 8 POJK No.19/POJK.03/2014 masih banyak mengalami kendala. Penelitian ini sangat berkaitan dengan kenyataan dimasyarakat pengguna jasa layanan keuangan. Maka dari itu peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis empiris.

¹ Abdulkadir Muhammad, **Hukum dan Penelitian Hukum**, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, hlm 112

² Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, **Dualisme Penelitian Hukum Normative Dan Empiris**, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2013, hlm 45

Pendekatan secara yuridis sosiologis yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata³. Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu karyawan BRI Cabang Manukan, Agen yang dinaungi oleh BRI Cabang Manukan dan beberapa nasabah BRI Cabang Manukan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di BRI Cabang Manukan Surabaya dengan pertimbangan bahwa di wilayah Surabaya terjadi peningkatan penggunaan jasa Laku Pandai dan pembukaan agen baru bagi laku pandai, namun BRI Cabang Manukan Surabaya mengalami kendala dalam menyelenggarakan program tersebut dikarenakan berbagai faktor. Hal tersebut yang mendorong penulis melakukan penelitian

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dibutuhkan atau

³ Soerjono Soekamto, **Pengantar Penelitian Hukum**, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 1986, hlm 51

dicari⁴. Studi lapangan yang dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk memperoleh informasi baik wawancara terhadap karyawan BRI Cabang Manukan Bagian FO (*Founding Officer*), Pelaku Laku Pandai dibawah pembinaan BRI Cabang Manukan, dan Nasabah dari Pelaku Laku Pandai.

Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di masyarakat⁵. Data primer dalam penelitian ini didapat dari hasil wawancara dan pengamatan di lapangan dengan sampel yang telah ditentukan setelah itu diolah oleh peneliti terkait pendapat, pengalaman maupun harapan tentang program laku pandai dalam pemenuhan pelaksanaan pasal 8 POJK Nomor 19/POJK.03/2014.

2) Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku atau literatur, peraturan perundang-undangan dan lain-lain yang ada hubungannya dengan masalah. Data Sekunder diambil di BRI Cabang Manukan, buku-buku dan karya tulis dari kalangan ahli hukum yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini berasal.

b. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

⁴ Saifudin Azwar, **Metode Penelitian**, Pustaka, Yogyakarta, 2013, hlm 91

⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm 156

Pada sumber data ini meliputi data yang diperoleh langsung melalui penelitian pada lokasi penelitian yang ditentukan yaitu berasal langsung dari lokasi penelitian dengan metode wawancara. Metode wawancara ini yang digunakan peneliti untuk menyusun laporan penelitian. Peneliti akan melakukan wawancara langsung terhadap karyawan BRI Cabang Manukan Bagian FO (*Founding Officer*), Pelaku Laku Pandai dibawah pembinaan BRI Cabang Manukan, dan Nasabah dari Pelaku Laku Pandai.

2) Sumber Data Sekunder

Untuk sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi bahan-bahan kepustakaan, data arsip, data resmi dari instansi yang digunakan sebagai tempat penelitian dan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu dari :

- a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Laku Pandai.
- b) Sumber buku-buku ilmu hukum.
- c) Peraturan Perundang-undangan yang mempunyai hubungan dengan permasalahan penelitian.
- d) Pendapat Pakar Hukum serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah data hukum primer dan data hukum sekunder, setelah itu dipadukan antara keduanya dan diimplementasikan dalam karya tulis ini untuk memenuhi suatu kebenaran dalam penelitian.

a. Teknik Pengumpulan Data Primer

Teknik pengumpulan data primer diambil dengan wawancara atau tanya jawab langsung dengan responden, dengan memakai pedoman wawancara yang telah dipersiapkan sebelumnya dengan tidak menyimpang dari permasalahan. Dalam penelitian ini pihak yang diwawancarai adalah pegawai BRI Cabang Manukan yang menangani program Laku Pandai.

b. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan, studi dokumen, dan internet.

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah mencari data yang tersedia pernah ditulis oleh peneliti terdahulu yang hubungannya dengan masalah yang akan diteliti dan informasi yang bersifat umum⁶. Studi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan mengutip literatur baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, maupun literatur terkait permasalahan yang dibahas. Studi ini dimaksudkan untuk mendapatkan landasan teori yang cukup guna mendukung analisis penelitian.

⁶ Bambang Sunggono, **Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 55

2. Studi Dokumentasi

Teknik studi dokumen yaitu mengumpulkan dan mengutip dengan cara membaca, mempelajari dokumen-dokumen resmi, buku, arsip, artikel, literatur serta tulisan yang lainyang menyangkut permasalahan penelitian dari Bank Rakyat Indonesia Cabang Manukan Surabaya.

3. Internet

Teknik ini diperoleh dari mengumpulkan dan mengutip literatur yang diperoleh dengan mengakses internet yang berhubungan dengan masalah yang di teliti, baik yang berupa jurnal online, berita online, maupun kamus besar bahasa Indonesia secara online.

5. Populasi Dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek atau seluruh individu atau seluruh unit yang akan di teliti⁷, dalam hal ini seluruh bagian dari BRI Cabang manukan termasuk karyawan, agen yang dinaungi oleh BRI Cabang manukan, dan nasabah BRI Cabang Manukan Surabaya.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang dianggap dapat mewakili populasinya⁸. Teknik penentuan sample penelitian yang akan diambil menggunakan cara *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan jenis

⁷ Ronny Hanintijo Soemitro, **Metode Penelitian Hukum dan Jumetri**, Semarang, Ghalia Indonesia, 1988, hlm 44

⁸ Sanipah Faisal, **Penelitian Kuantitatif Dasar-dasar dan Aplikasi**, Malang, YA3, 1990, hlm 30

sampling dengan berdasarkan pada ciri-ciri atau karakteristik tertentu dari populasi yang telah diketahui sebelumnya⁹. Sampel dipenelitian ini peneliti mengambil 2 karyawan bagian *Founding Officer (FO)* yang menangani kredit sebanyak 2 orang, 2 agen Laku Pandai, dan 1 nasabah laku pandai dengan jumlah sampel adalah 5 orang.

6. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah data menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, serta memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain¹⁰. Dalam penelitian ini dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Metode ini memaparkan semua data, baik berupa data primer yang berupa wawancara dari karyawan BRI Cabang Manukan, Agen laku pandai dan nasabah laku pandai yang berada di naungan BRI Cabang Manukan, maupun data sekunder yang telah diperoleh berupa buku-buku, kemudian dideskripsikan dalam suatu pembahasan, dikaitkan dengan teori-teori dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/Pojk.03/2014 Tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif Mengenai Kewajiban Penyaluran Kredit Bagi UMKM.

a. Teknik Yang Akan Digunakan Dalam Data Primer

⁹ Amirudin Dan H. Zainal Asiki, **Pengantar Metodologi Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, cetakan ke-6, 2012, hlm 106

¹⁰ Lexy J. Moelong, **Metodologi Penelitian Kualitatif**, PT. Remaja Rosdakarya Offset, Bandung, 2012, hlm 248

Teknik yang akan digunakan dalam data primer ini adalah menggunakan teknik analisa deskriptif kualitatif, yaitu cara pembahasan dengan menggambarkan dan melakukan analisis secara jelas dan sistematis terhadap data-data yang diperoleh di lapangan berupa kata-kata. Adapun tahapan dalam penelitian kualitatif yaitu¹¹ :

1) Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan mencari, mencatat, dan mengumpulkan data melalui hasil wawancara, dokumentasi, serta observasi yang terkait dengan pelaksanaan penerapan Pasal 8 POJK Nomor 19/Pojk.03/2014 tentang layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif mengenai kewajiban penyaluran kredit bagi umkm di BRI Cabang Manukan Surabaya.

2) Reduksi Data

Reduksi data merupakan penelitian data, penyederhanaan dan abstraksi dari data di lapangan kemudian dituangkan kedalam uraian atau laporan yang lengkap dan juga terperinci. Laporan lapangan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, serta difokuskan pada hal-hal yang penting. Sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah penelitian untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

3) Klasifikasi Data

Data yang diperoleh dan terkumpul selama penelitian kemudian diklasifikasikan sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu termasuk dalam

¹¹ Sugiyono, **Statistika Untuk Penelitian**, Bandung, 2014, hlm 247

pelaksanaan, hambatan-hambatan dan juga upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan penerapan Pasal 8 POJK Nomor 19/Pojk.03/2014 tentang layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif mengenai kewajiban penyaluran kredit bagi umkm di BRI Cabang Manukan Surabaya.

4) Penyajian Data

Penyajian data dimaksudkan agar mempermudah untuk mendeskripsikan data sehingga akan lebih mudah mempelajari dan memahami mengenai apa yang telah diteliti.

5) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Setelah dilakukan penyajian data, maka kesimpulan awal dapat dilakukan. Penarikan kesimpulan dilakukan selama penelitian berlangsung. Sejak awal kelapangan serta dalam proses pengumpulan data penelitian berusaha melakukan analisis dan mencari makna dari data yang telah terkumpul. Kesimpulan perlu diverifikasi agar cukup mantap dan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

b. Teknik Analisi Data Sekunder

Teknik analisis data sekunder yang digunakan adalah deskriptif terus menerus, yaitu dengan cara memaparkan data yang diperoleh untuk selanjutnya ditafsirkan, dianalisis kemudian disusun dan dijabarkan untuk mendukung dan melengkapi data primer.

7. Definisi Oprasional

a. Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Efektifitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas mengandung arti “keefektifan” (*effectiveness*) pengaruh/efek keberhasilan, atau kemandirian/ kemujaraban¹². Dengan kata lain efektifitas menunjukkan sampai seberapa jauh pencapaian hasil yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini yang akan diteliti mengenai bagaimana efektivitas penerapan Pasal 8 POJK No. 19/POJK.03/2014 yang dijadikan dasar BRI Cabang Manukan membuat layanan keuangan tanpa kantor terutama mengenai penyaluran kredit bagi UMKM.

b. Layanan Keuangan Tanpa Kantor

Layanan Keuangan Tanpa Kantor adalah pemberian layanan keuangan di luar cabang bank konvensional, yang sering menggunakan agen dan mengandalkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengirimkan rincian transaksi, biasanya menggunakan ponsel. Sehingga berpotensi untuk mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh konsumen dan memberikan kenyamanan kepada konsumen¹³. Layanan keuangan tanpa kantor disini lebih dikhususkan ke layanan jasa dan pembukaan agen yang di bentuk oleh bank BRI Cabang Manukan.

c. Keuangan Inkusif

¹² Barda Nawawi Arif, **Kapita Selektta Hukum Pidana**, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003, hlm 85

¹³ CGAP, **Branchless Banking Diagnostic Template**, February 2010

Menurut *Rangarajan Committe*, *financial inclusion* adalah cara untuk mengetahui dan memastikan apakah kaum miskin serta masyarakat dengan penghasilan rendah telah mendapatkan layanan keuangan seperti kredit dengan biaya pengembalian yang wajar¹⁴. Bank Indonesia (BI) membuat sebuah kebijakan untuk meningkatkan inklusif finansial yang disebut dengan : kebijakan keuangan inklusif. Kebijakan tersebut berbentuk pendalaman layanan keuangan (*financial service deepening*) yang menysasar orang-orang kelas menengah bawah. Jadi layanan keuangan di Indonesia tidak hanya untuk kelas menengah atas, tetapi juga kelas menengah bawah. Setiap Warga Negara Indonesia berhak untuk mendapatkan kemudahan akses terhadap produk finansial. Bank Indonesia memiliki sebuah indeks yang bertujuan untuk mengukur tingkat inklusif keuangan yang disebut dengan IKI. Keuangan inklusif yang dimaksud penulis disini hanya terbatas dalam layanan yang dikeluarkan oleh bank maupun agen di bawah naungan BRI, termasuk BRI Cabang Manukan.

d. Kredit

Pengertian kredit untuk kegiatan perbankan di Indonesia telah dirumuskan dalam Undang – Undang Pokok Perbankan No. 7 Tahun 1992 yang menyatakan bahwa kriteria adalah penyediaan uang / tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan / kesepakatan pinjam meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melaksanakan dengan jumlah bunga sebagai imbalan. Dalam praktek sehari hari pinjaman kredit dinyatakan dalam bentuk perjanjian

¹⁴ Ezazul Islam dan Salim Al Mamun, **Financial Inclusion, The role of Bangladesh Bank**, Dhaka, Research Department Bangladesh Bank Office. 2011

tertulis baik dibawah tangan maupun secara materiil, dan dengan jaminan pengaman, pihak peminjam akan memenuhi kewajiban dan menyerahkan jaminan baik bersifat kebendaan maupun bukan kebendaan.

Sebenarnya sasaran kredit pokok dalam penyediaan pinjaman tersebut bersifat penyediaan suatu modal sebagai alat untuk melaksanakan kegiatan usahanya sehingga kredit (dana bank) yang diberikan tersebut tidak lebih dari pokok produksi semata¹⁵. Kredit disini dibatasi hanya sebatas kredit yang dikeluarkan pihak BRI Cabang Manukan secara langsung maupun melalui Agen BRI Cabang manukan yang di khususkan dalam kredit UMKM

e. UMKM

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM Sesuai dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 pengertian UMKM adalah:

- 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha Mikro memiliki kriteria asset maksimal sebesar 50 juta dan omzet sebesar 300 juta.
- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Usaha

¹⁵

37

Teguh P. Mulyono, **Manajemen Perkreditan Komersil**, Yogyakarta, BPFE, 1987, hlm

Kecil memiliki kriteria asset sebesar 50 juta sampai dengan 500 juta dan omzet sebesar 300 juta sampai dengan 2,5 miliar.

- 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha Menengah memiliki kriteria asset sebesar 500 juta sampai dengan 10 miliar dan omzet sebesar 2,5 miliar sampai dengan 50 miliar.

UMKM yang dimaksud disini dibatasi hanya UMKM yang menjadi nasabah penerima kredit melalui layanan Laku Pandai atau melalui Agen yang dinaungi oleh BRI Cabang manukan. Dalam hal ini yang akan dikaji secara detail dan dibahas secara mendalam kaitannya dengan judul yang dibuat oleh penulis guna mengetahui sejauh mana penerapan Pasal 8 POJK Nomor 19/POJK.03/2014, khusus di BRI Cabang Manukan Surabaya.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Surabaya

a. Sejarah Kota Surabaya

Surabaya sebagai sebuah nama kota seperti sekarang ini, secara resmi berdiri pada tahun 1293. Tanggal peristiwa yang diambil adalah kemenangan Raden Wijaya, Raja pertama Mojopahit melawan pasukan Cina. Peranan Surabaya sebagai kota pelabuhan sangat penting sejak lama. Sungai Kalimas sebagai saksi sejarah merupakan sungai yang dipenuhi perahu-perahu yang berlayar menuju pelosok Surabaya. Kota Surabaya juga sangat berkaitan dengan revolusi Kemerdekaan Republik Indonesia. Sejak penjajahan Belanda maupun Jepang, rakyat Surabaya (Arek Suroboyo) bertempur habis-habisan untuk merebut kemerdekaan. Puncaknya pada tanggal 10 Nopember 1945, Arek Suroboyo berhasil menduduki Hotel Oranye (sekarang Hotel Mojopahit) yang saat itu menjadi simbol kolonialisme. Karena kegigihannya itu, maka setiap tanggal 10 Nopember, Indonesia memperingatinya sebagai hari Pahlawan.

Bukti sejarah menunjukkan bahwa Surabaya sudah ada jauh sebelum zaman kolonial, seperti yang tercantum dalam prasasti Trowulan I berangka 1358 M. Dalam prasasti tersebut terungkap bahwa Surabaya (Churabhaya) masih berupa desa ditepian sungai Berantas sebagai salah satu tempat penyeberangan penting sepanjang sungai tersebut. Surabaya (Churabhaya) juga tercantum dalam pujasastra Negara Kertagama yang ditulis oleh Mpu Prapanca tentang perjalanan

pesiar baginda Hayam Wuruk pada tahun 1385 M dalam pupuh XVII (bait ke 5, baris terakhir). Walaupun bukti tertulis tertua mencantumkan nama Surabaya berangka tahun 1358 M Pprasasti Trowulan) dan 1365 M (Negara Kertagama), para ahli menduga bahwa Surabaya sudah ada sebelum tahun-tahun tersebut. Menurut hipotesis Von Faber, Surabaya didirikan tahun 1275 M oleh Raja Kertanegara sebagai tempat pemukiman baru bagi prajuritnya yang berhasil menumpas pemberontakan Kemuruhan tahun 1270 M. Hipotesis yang lain mengatakan bahwa Surabaya dulu bernama Ujung Galuh.

Versi lain mengatakan bahwa nama Surabaya berasal dari cerita tentang perkelahian hidup dan mati Adipati Jayengrono dan Sawunggaling. Konon setelah mengalahkan tentara Tartar, Raden Wijaya mendirikan sebuah Keraton di Ujung Galuh dan menempatkan Adipati Jayengrono untuk memimpin daerah itu. Lama-lama karena menguasai ilmu Buaya, Jayengrono makin kuat dan mandiri sehingga mengancam kedaulatan Majapahit. Untuk menaklukkan Jayengrono diutuslah Sawunggaling yang menguasai ilmu Sura. Adu kekuatan dilakukan dipinggir sungai Kalimas dekat Peneleh. Perkelahian adu kesaktian itu berlangsung selama tujuh hari tujuh malam dan berakhir dengan tragis, karena keduanya meninggal kehabisan tenaga. Kata “ SURABAYA “ juga sering diartikan secara filosofis sebagai lambang perjuangan antara darat dan air, antara tanah dan air. Selain itu dari kata Surabaya juga muncul mitos pertempuran antara ikan Suro (Sura) dan Boyo (Baya atau Buaya), yang menimbulkan dugaan bahwa nama Surabaya muncul setelah terjadinya peperangan antara ikan Sura dan Buaya (Baya).

Supaya tidak menimbulkan kesimpang-siuran dalam masyarakat maka Walikotamdy Kepala Daerah Tingkat II Surabaya, dijabat oleh Bapak Soeparno,

mengeluarkan Surat Keputusan No. 64/WK/75 tentang penetapan hari jadi kota Surabaya. Surat Keputusan tersebut menetapkan tanggal 31 Mei 1293 sebagai tanggal hari jadi kota Surabaya. Tanggal tersebut ditetapkan atas kesepakatan sekelompok sejarawan yang dibentuk oleh Pemerintah Kota bahwa nama Surabaya berasal dari kata “Sura ing Bhaya” yang berarti “ Keberanian menghadapi bahaya “ diambil dari babak dikalahkannya pasukan Mongol oleh pasukan Jawa pimpinan Raden Wijaya pada tanggal 31 Mei 1293.

Simbol kota Surabaya yang berupa ikan Sura dan Buaya terdapat banyak sekali cerita. Salah satu yang terkenal tentang pertarungan ikan Sura dan Buaya diceritakan oleh LCR. Breeman seorang pimpinan Nutspaarbanc di Surabaya pada tahun 1918. Masih banyak cerita lain tentang makna dan semangat Surabaya. Semuanya mengilhami pembuatan lambang-lambang Kota Surabaya. Lambang kota Surabaya yang berlaku sampai saat ini ditetapkan oleh DPDRS kota besar Surabaya yang keputusan No. 34/DPRS tanggal 19 Juni 1955 diperkuat dengan Keputusan Presiden R.I No. 193 tahun 1955 tanggal 14 Desember 1956.¹

b. Geografis Kota Surabaya

Surabaya secara geografis berada pada 07°09'00" – 07°21'00" Lintang Selatan dan 112°36' - 112°54' Bujur Timur. Luas wilayah Surabaya meliputi daratan dengan luas 350,54 km² dan lautan seluas 190,39 km². Secara Administratif pemerintahan terbagi kedalam 31 [kecamatan](#) dan 163 [kelurahan](#) dengan batas – batas wilayah sebagai berikut² :

¹ <https://sparkling.surabaya.go.id/about-surabaya/the-history-of-surabaya/> (diakses tanggal 12 Maret 2018)

² http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Surabaya/ (diakses tanggal 12 Maret 2018)

Sebelah Timur : Selat Madura

Sumber : <http://insurabaya.blogspot.co.id/2014/02/peta-surabaya.html> diakses tanggal 12 Maret 2018

a. Sejarah singkat PT. Bank Rakyat Indonesia

Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan

di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja dengan nama De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden atau "Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi Purwokerto", suatu lembaga keuangan yang melayani orang-orang berkebangsaan Indonesia (pribumi). Lembaga tersebut berdiri tanggal 16 Desember 1895, yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran BRI.³

Pada periode setelah kemerdekaan RI, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1946 Pasal 1 disebutkan bahwa BRI adalah sebagai Bank Pemerintah pertama di Republik Indonesia. Dalam masa perang mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1948, kegiatan BRI sempat terhenti untuk sementara waktu dan baru mulai aktif kembali setelah perjanjian Renville pada tahun 1949 dengan berubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat. Pada waktu itu melalui PERPU No. 41 tahun 1960 dibentuklah Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) yang merupakan peleburan dari BRI, Bank Tani Nelayan dan Nederlandsche Maatschappij (NHM). Kemudian berdasarkan Penetapan Presiden (Penpres) No. 9 tahun 1965, BKTN diintegrasikan ke dalam Bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan.

Setelah berjalan selama satu bulan, keluar Penpres No. 17 tahun 1965 tentang pembentukan bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia. Dalam ketentuan baru itu, Bank Indonesia Urusan Koperasi, Tani dan Nelayan (eks BKTN) diintegrasikan dengan nama Bank Negara Indonesia unit II bidang Rural, sedangkan NHM menjadi Bank Negara Indonesia unit II bidang Ekspor Impor (Exim). Berdasarkan Undang-Undang No. 14 tahun 1967 tentang Undang-

³ [www//http.wikipedia](http://www.wikipedia), BRI, Sejarah Singkat BRI, (diakses pada 10 Maret 2018)

undang Pokok Perbankan dan Undang-undang No. 13 tahun 1968 tentang Undang-undang Bank Sentral, yang intinya mengembalikan fungsi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dan Bank Negara Indonesia Unit II Bidang Rular dan Ekspor Impor dipisahkan masing-masing menjadi dua Bank yaitu Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor Indonesia. Selanjutnya berdasarkan Undang-undang No. 21 tahun 1968 menetapkan kembali tugas tugas pokok BRI sebagai bank umum⁴.

Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun 1992 status BRI berubah menjadi perseroan terbatas. Sampai sekarang PT. BRI (Persero) Yang didirikan sejak tahun 1895 tetap konsisten memfokuskan pada layanan kepada masyarakat kecil, diantaranya dengan memberikan fasilitas kredit kepada golongan pengusaha kecil⁵. Seiring dengan perkembangan dunia perbankan yang semakin pesat maka sampai saat ini bank rakyat indonesia mempunyai unit kerja yang berjumlah 4.447 buah. Yang terdiri dari 1 kantor pusat BRI, 12 kantor wilayah inspeksi/SPI. 170 kantor Cabang (dalam negeri), 145 Kantor Cabang Pembantu, 1 Kantor Perwakilan khusus, 1 new york Agency, 1 Caymand island Agency, 1 kantor Perwakilan di hongkong, 40 Kantor Kas Bayar, 6 Kantor Mobil Bank, 193 P.POINT, 3.705 BRI UNIT dan 357 Pos Pelayanan desa.

BRI sebagai perusahaan terbuka berkomitmen mematuhi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam kegiatan operasional bank maupun pasar modal. Hal tersebut telah mendorong BRI untuk selalu mengutamakan

⁴ *ibid*

⁵ *ibid*

prudential banking dan kepentingan stakeholders. Bri menerapkan nilai-nilai perusahaan (corporate value) yang menjadi budaya kerja perusahaan (corporate value) yang menjadi budaya kerja perusahaan yang solid dan berkarakter. Nilai-nilai tersebut adalah integritas, profesionalisme, kepuasan Nasabah, Keteladanan, dan Penghargaan kepada SDM. Komitmen ini juga di wujudkan dalam bentuk tata kelola perusahaan sebagai berikut:⁶

- 1) Mengintensifkan program budaya sadar resiko dan kepatuhan kepada setiap pekerja diseluruh unit kerja.
- 2) Mengintensifkan peningkatan kualitas pelayanan di seluruh unit kerja.
- 3) Menjabarkan dan memonitorkan setiap kemajuan yang dicapai perusahaan kedalam rencana tindakan yang terukur (RKA) dan dapat dipertanggungjawabkan oleh setiap unit kerja.

Kepemilikan BRI saat itu masih 100% di tangan Pemerintah Republik Indonesia. Pada tahun 2003, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjual 30% saham bank ini, sehingga menjadi perusahaan publik dengan nama resmi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., yang masih digunakan sampai dengan saat ini.

b. Visi Misi dan Tujuan⁷

Visi PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah bank terkemuka dan terbuka yang selalu mengutamakan kepuasan semua para nasabah yang diseluruh Indonesia agar selalu mempercayai Bank Rakyat Indonesia sebagai Bank terbaik di Indonesia ini.

⁶ Laporan Tahunan BRI, Kerja Nyata Bagi Negeri Membangun UMKM Unggul Di Era Digital, 2017

⁷ *ibid*

Misi BRI :

- 1) BRI melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan memprioritaskan pelayanan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), untuk menunjang perekonomian di Negara Indonesia.
- 2) BRI memberikan pelayanan prima kepada para nasabahnya melalui jaringan kerja luas dan didukung sumber daya manusia (SDM) yang profesional dan ahli dengan melakukan banyak praktek tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance).
- 3) BRI selalu memberikan keuntungan dan manfaat seoptimal mungkin kepada para berbagai pihak yang berkepentingan atau kepada para nasabah.

Tujuan :

- 1) Menjadi bank sehat dan salah satu dari lima bank terbesar dalam asset dan keuntungan.
- 2) Menjadi bank terbesar dan terbaik dalam pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah.
- 3) Menjadi bank terbesar dan terbaik dalam pengembangan agrobisnis.
- 4) Menjadi salah satu bank go public terbaik.
- 5) Menjadi bank yang melaksanakan good corporate governance secara konsisten.
- 6) Menjadikan budaya kerja BRI sebagai sikap dan perilaku semua insane BRI.

c. Sejarah Cabang BRI Manukan Surabaya

Kantor Wilayah Surabaya memiliki 12 Kantor Cabang. Kantor Cabang BRI di Surabaya meliputi BRI Cabang Jemursari, BRI Cabang Diponegoro, BRI Cabang HR Muhammad, BRI Cabang Kaliasin, BRI Cabang Kapas Kerampung, BRI Cabang Kertajaya, BRI Cabang Kusuma Bangsa, BRI Cabang Mulyosari, BRI Cabang Pahlawan, BRI Cabang Rajawali, BRI Cabang Tanjung Perak, BRI Dan Cabang Manukan. BRI Cabang Manukan berada di Daerah Surabaya Barat. Alamat Kantor Cabang Manukan adalah jalan Manukan Tama no 208 Surabaya.⁸

Pada tahun 2002 Kantor cabang Manukan adalah Kantor Cabang Pembantu dari Kantor Cabang HR Muhammad, Kemudian pada tahun 2014 KCP Manukan berubah menjadi Kantor Cabang sendiri. Kantor Cabang Manukan memiliki 2 Kantor Cabang Pembantu yaitu KCP Darmosatelit dan KCP Margomulyo. Kantor cabang Manukan tergolong baru menjadi Kantor cabang Bri di Surabaya.

d. Struktur Organisasi PT. Bank Rakyat Indonesia

Struktur organisasi adalah suatu kerangka yang mewujudkan pola tetap dari hubungan-hubungan diantara bidang-bidang kerja, maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan, wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam suatu sistem kerjasama⁹. Dengan adanya struktur organisasi dapat menggambarkan dengan jelas hak dan kewajiban serta tanggung jawab masing-masing posisi jabatan yang dimiliki.

⁸ Wawancara dengan ADK BRI Kanca Manukan

⁹ Supardi dan Anwar, Saiful, 1993. Dasar Dasar Perilaku Organisasi. Yogyakarta: UII Press

Tujuan pembentukan suatu organisasi adalah untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan terlebih dahulu. Pembagian peran, ruang lingkup, tanggung jawab dan wewenang kegiatan organisasi yang diterapkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.

Dalam struktur organisasi terdapat kerangka kerja yang menggambarkan hubungan tiap-tiap bagian. Berikut gambar Struktur Organisasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Manukan:



Gambar Struktur Organisasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Manukan yang menangani Kredit Usaha



STRUKTUR ORGANISASI KANCA BRI SURABAYA MANUKAN

(Surat Keputusan Kanpus BRI Nokep : B.876-DIR/CDS/09/2016, tanggal 20 September)

Sumber : Dokumen BRI Kanca Manukan

B. Gambaran Umum Perkembangan Layanan Keuangan Tanpa Kantor Di BRI Cabang Manukan

Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif atau Laku Pandai adalah salah satu program yang digunakan pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan meningkatkan akses dan pengetahuan serta kemudahan layanan keuangan dalam jasa perbankan.

Tujuan program Laku Pandai adalah merekrut masyarakat untuk menjadi agen bank di daerahnya. Bank menawarkan kepada siapa saja yang berminat menjadi agen mereka dengan cara membuat bank di rumah atau tempat usahanya. Agen Laku Pandai bisa dalam bentuk perorangan atau badan hukum yang bekerjasama dengan bank penyelenggara sehingga bisa menjadi kepanjangan tangan bank untuk melayani perbankan dan layanan keuangan lainnya dalam rangka keuangan inklusif. Keuntungan menjadi agen adalah mendapatkan plafon transaksi sesuai dengan sejumlah dana yang disimpan di BRI.

Dengan adanya POJK nomor 19/POJK.03/2014 Tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif dan dipertegas dengan Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S. 22-DIR/ADK/08/15 tanggal 08 Agustus 2015 Tentang Kredit Usaha Ritel bahwa pelayanan branchless banking telah resmi dilaksanakan oleh pihak BRI, termasuk BRI Cabang Manukan dengan nama produk BRILink.



Syarat untuk menjadi agen Lakupandai di Bank BRI adalah sebagai berikut:

- a. Status penduduk setempat yang sudah dikenal baik masyarakat sekitarnya.
- b. Syarat umum administratif (KTP dan Kartu Keluarga).
- c. Mempunyai SIUP dan TDP atau Surat Keterangan usaha dari kelurahan.
- d. Calon agen harus sudah menjadi nasabah bank yang bersangkutan (minimal 2 tahun) dan dipercaya bank.
- e. Mempunyai usaha utama yang telah berjalan sekurang-kurangnya 2 tahun dengan lokasi usaha yang tetap dan strategis.
- f. Yang bersangkutan harus memiliki kemampuan, kredibilitas, reputasi, dan integritas yang baik.
- g. Jika agen Laku Pandai juga merupakan salah satu nasabah kredit, maka ada syarat tambahan lagi yaitu, tidak boleh mengalami keterlambatan pembayaran cicilan kredit selama 6 bulan terakhir.
- h. mempunyai rekening tabungan atau giro BRI yang dilengkapi kartu ATM/debit,
- i. mempunyai sejumlah dana pada rekening tabungan atau giro untuk keperluan transaksi.

Agen BRILink di Cabang manukan mendirikan paguyuban untuk sebagai tempat atau wadah jika para agen mendapatkan kendala lapangan seperti manarik pelanggan agar datang ke agen BRILink daripada datang ke kantor Bri. Dari di luncurkan pertama kali BRILink Oleh Bri tahun 2014 BRI cabang Manukan baru 7 bulan berjalan mendirikan Paguyuban yang bernama LINKMAN yang diketuai

oleh Bapak Mukhamadun (agen BRILink Habibi Cell). Jumlah agen tahun 2018 sebanyak 220 orang.

Dikarenakan adanya perbedaan kepercayaan nasabah perkotaan dan pedesaan, usaha paguyuban Linkman adalah memberikan promosi sendiri terhadap nasabah jika ingin bertransaksi di agen. Contohnya dengan memberikan minuman atau hadiah jika sudah bertransaksi lebih dari 1x di agen BRILink. Setelah dilakukan promosi maka sedikit demi sedikit nasabah lebih percaya datang kepada agen, daripada harus mengantri di teller untuk menarik uang atau menabung di BRI.

Salah satu contoh agen BRILink Habibi Cell yang berada di JL Gading Watu Kec Menganti Gresik mendapatkan prestasi dengan menjadi agen terbaik di Kantor BRI wilayah Surabaya dengan transaksi minimal 3000 transaksi setiap bulannya. Bapak Muhkamadun sebagai pemilik agen mendapatkan hadiah Umroh dari BRI wilayah Surabaya. Dahulu tahun 2014 modal yang dimiliki bapak Muhkamadun adalah 200 ribu untuk menjadi agen BRILink, namun saat ini modal yang dimiliki Bapak Mukhamadun adalah kurang lebih 200 juta rupiah. Tidak hanya bertransaksi cash in atau cash out yang dilakukan, tetapi banyak juga nasabah yang ingin mengajukan kredit usaha lewat agen Habibi Cell tersebut. Calon nasabah tersebut terdiri dari warga sekitar daerah rumah Bapak Mukhamadun atau nasabah yang sering bertransaksi di agen Habibi Cell dan mereka membaca di benner BRILink adanya fasilitas kredit usaha rakyat melalui agen BRILink.

C. Efektivitas Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Penyaluran Kredit Di BRI Cabang Manukan

Untuk menjalankan pasal 8 POJK Nomor 19/POJK.03/2014 tentang layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif mengenai kewajiban penyaluran kredit bagi UMKM BRI, Bank wajib menyalurkan kredit atau pembiayaan produktif kepada nasabah mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari total portofolio kredit atau pembiayaan untuk nasabah mikro dalam rangka Laku Pandai.” Penyaluran kredit atau pembiayaan produktif kepada nasabah mikro bank BRI Cabang Manukan dituntut untuk menyalurkan minimal 70% dari total portofolio kredit atau pembiayaan untuk nasabah mikro dalam hal laku pandai. BRI menyediakan layanan kredit usaha mikro pada layanan BRILink.

Gambar 3. Ketentuan layanan

Nama Bank	: PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk
Nama Program LakuPandai	: Agen BRILink
Nama Tabungan BSA	: Tabunganku BSA
Electronic Device dariAgen	: <i>Electronic Data Capture (EDC) dan Web/Mobile Based</i>
Electronic Device dariNasabah	: Kartu Debit
Produk Keuangan lain yang dapat ditransaksikan di Agen	: 1. T bank (e-money registered) 2. Asuransi Mikro – Kesehatan, Kecelakaan dan Meninggal Dunia (AMKKM) (Perusahaan Asuransi Bringin Life) 3. Kredit Mikro (KUR) 4. Tabunganku BSA 5. Tunai (Setoran dan Tarik Tunai) 6. Program Pemerintah 7. Pembayaran dan Pembelian 8. Transfer (Sesama dan Antar Bank)

Biaya Penyetoran		Biaya Penarikan			
Tabungan BSA	Produk Keuangan Lain	Tabungan BSA		Produk Keuangan Lain	
		Agen Individu	Agen Badan Hukum	Agen Individu	Agen Badan Hukum
Free	Rp 1.000	Free	Free	Free	Free

Sumber Dokumen BRI Kanca Manukan

Berdasarkan gambar diatas berdasarkan lapangan BRI belum memberikan fitur Laku Pandai untuk melayani jasa Kredit Mikro(KUR). Apabila ada nasabah yang menginginkan kredit mikro, nasabah dilayani di kantor dan melewati beberapa screening data yang meliputi Identitas, legalitas usaha, BI cheking, Sedangkan Laku Pandai tersebut hanya kepanjangan tangan dari BRI jika ada nasabah yang membutuhkan kredit. Adapun syarat untuk melakukan pinjaman adalah sebagai berikut:¹²

1. Syarat dan ketentuan kredit

a. Persyaratan Umum Calon Debitur:

- 1) Mempunyai usaha produktif dan layak.
- 2) Tidak sedang menerima kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi dari perbankan dan/atau tidak sedang menerima kredit program dari pemerintah kecuali Kredit Usaha Rakyat (KUR) Ritel, yang dibuktikan dengan hasil Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia (SID BI) pada saat permohonan kredit diajukan. Dalam hal calon Debitur masih memiliki baki debet kredit produktif dan kredit program diluar KUR yang tercatat pada Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia (SID BI), tetapi yang bersangkutan sudah melunasi pinjaman, maka diperlukan Surat Keterangan Lunas/Roya dengan lampiran cetakan rekening koran dari bank pemberi kredit/pembiayaan sebelumnya.

¹²

SURAT EDARAN BRI NOSE : S.22-DIR/ADK/08/15 LAMPIRAN 1

- 3) Dapat sedang menerima kredit konsumtif seperti Kredit Kepemilikan Rumah, Kredit Kendaraan Bermotor, dan Kartu Kredit serta KUR Ritel dengan kolektibilitas Lancar.
- 4) Calon debitur yang sedang menerima KUR Ritel diperbolehkan mendapatkan fasilitas tambahan kredit dengan total pinjaman sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Untuk skema Kredit Investasi dengan Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja dengan Kredit Modal Kerja.
 - b) Pemberian Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja dapat dilakukan bersamaan dalam Program KUR Ritel.
 - c) KUR Ritel diberikan hanya untuk KMK atau KI saja. Dalam hal diperlukan tambahan fasilitas KMK atau KI, dapat diberikan melalui mekanisme suplesi.
- 5) Telah melakukan usaha secara aktif minimal 6 bulan, berdasarkan atas hasil pemeriksaan (on the spot) oleh AO Pangan dan dituangkan dalam Formulir LKN.
- 6) Legalitas Calon Debitur :
 - a) Individu : Identitas berupa KTP dan Kartu Keluarga.
 - b) Koperasi : Anggaran Dasar beserta perubahannya.
 - c) Badan usaha lainnya : Akta Pendirian beserta perubahannya.
- 7) Memiliki Surat Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) yang diterbitkan Pemerintah Daerah setempat atau surat ijin usaha lainnya yang dapat dipersamakan dengan IUMK.

2. Jangka Waktu KUR Ritel

KUR Ritel dapat diberikan untuk keperluan modal kerja atau investasi, dengan ketentuan sebagai berikut :

No	Pola Angsuran	Jangka Waktu	Keterangan
1	Sekali Lunas	1 (satu) siklus budidaya/usaha	Diberikan untuk 1 (satu) siklus usaha dengan jangka waktu maksimal 24 bulan. Contoh : budidaya tebu dan singkong.
2	Bulanan	Maksimal 36 bulan	Penurunan pokok proporsional setiap bulan.
3	Sesuai siklus budidaya/usaha	Maksimal 12 Bulan	Penurunan pokok proporsional setiap siklus budidaya/usaha.

Tabel 2. Pola Angsuran Kredit Modal Kerja

3. Kebijakan Prosedur Kredit

a. Permohonan dan Prakarsa Kredit

Pengajuan permohonan kredit dilakukan oleh debitur dengan mengisi formulir SKPP yang dilampiri antara lain dengan :

- 1) Copy Legalitas calon debitur
- 2) Copy Perijinan Calon debitur
- 3) Data usaha dan dokumen yang diperlukan untuk analisa kebutuhan kredit.

b. Analisa Kredit

- 1) Tujuan (analisa) kredit adalah untuk mengetahui tingkat kemampuan dan kemauan debitur membayar kembali kreditnya kepada bank melalui analisa cash flow, karakter (character), kapasitas (capacity), modal (capital), kondisi ekonomi (condition) dan agunan (collateral).
 - 2) Hasil analisa dituangkan dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) sebagai dasar pertimbangan bagi Pemutus dalam memberikan putusan kredit.
 - 3) Keterangan yang menyatakan kredit dijaminakan kepada Perusahaan Penjamin dicantumkan dalam Memorandum Analisa Kredit dan Putusan Kredit.
- c. Perhitungan Kebutuhan Kredit
- 1) Pertanian dan Perikanan (On Farm)

Kredit Modal Kerja, perhitungan kredit modal kerja berdasarkan pendekatan unit cost yang komponen dan besarnya sebagaimana pada lampiran SE. Lampiran tersebut merupakan acuan dalam penentuan unit cost pembiayaan. Apabila di suatu wilayah terdapat perbedaan besaran nominal pada komponen unit cost, serta terdapat komoditas pangan yang unit cost-nya belum termasuk dalam lampiran tersebut maka besarnya dapat disesuaikan dengan kondisi wilayah setempat dengan memperhatikan kewajaran nilai unit cost tersebut.
 - 2) Kredit Investasi

- a) Perhitungan kredit investasi berdasarkan pendekatan Total Project Cost (TPC) investasi yang akan dibiayai sesuai dengan kebutuhan budidaya.
 - b) Perhitungan kebutuhan kredit investasi memperhitungkan Total Project Cost (TPC) dikurangi Sharing Dana Sendiri (SDS).
 - c) Sharing Dana Sendiri (SDS) adalah bagian dari TPC yang pendanaannya dari calon debitur dengan jumlah sesuai ketentuan PPK Bisnis Ritel yang berlaku.
 - d) Industri Pengolahan dan Perdagangan
- 3) Kredit Modal Kerja
- a) Perhitungan kebutuhan kredit modal kerja berdasarkan aktiva lancar atau kebutuhan biaya operasional untuk mendukung target produksi/penjualan yang akan dilakukan selama jangka waktu kredit.
 - b) Perhitungan maksimal kredit dapat hanya berdasarkan pendekatan Repayment Capacity (RPC)
 - c) Sharing Dana Sendiri (SDS) sesuai ketentuan PPK Bisnis Ritel yang berlaku.
- 4) Kredit investasi
- a) Kebutuhan investasi dalam rangka mendukung sarana usaha.
 - b) Sarana usaha dimaksud berupa bangunan, mesin, atau peralatan pendukung lainnya.

- c) Perhitungan kebutuhan kredit investasi memperhitungkan Total Project Cost (TPC) dikurangi Sharing Dana Sendiri (SDS) dan kemampuan Repayment Capacity.
- d) Sharing Dana Sendiri (SDS) adalah bagian dari TPC yang pendanaannya dari calon debitur dengan jumlah sesuai ketentuan PPK Bisnis Ritel yang berlaku.

d. Agunan dan Pengikatannya

1) Agunan pokok

Agunan kredit dapat hanya berupa agunan pokok apabila berdasarkan aspek lain dalam jaminan utama (proyek/usaha yang dibiayai), telah diperoleh keyakinan atas kemampuan debitur untuk mengembalikan hutangnya.

2) Agunan tambahan.

Agunan tambahan, berupa tanah, bangunan, kendaraan, mesin-mesin dan barang lainnya yang mempunyai nilai dan dapat menjadi second way out sesuai SE Direksi BRI tentang agunan yang berlaku dengan nilai pengikatannya maksimal 100% dari plafond yang diberikan.

e. Tipe, Struktur dan Syarat Kredit

Tipe, struktur dan syarat kredit disesuaikan dengan jenis kredit.

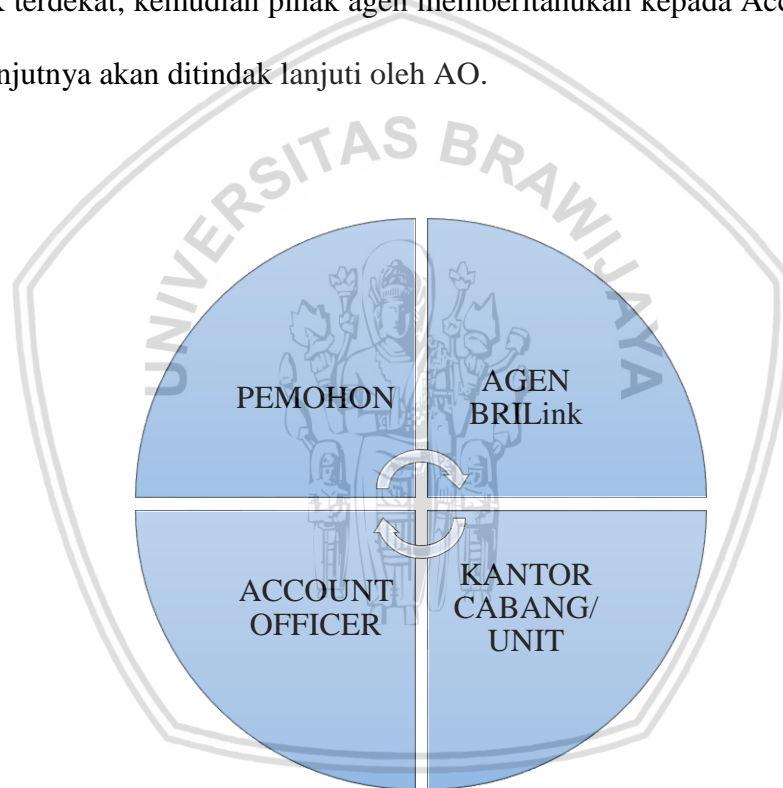
f. Kewenangan Memutus Kredit

Kewenangan memutus penyaluran kredit dengan pola penjaminan ini mengacu pada SK Direksi Nokep. S.13-DIR/ADK/06/2015 tanggal 22

Juni 2015 tentang Komite Kredit dan Putusan Delegasi Wewenang Kredit (PDWK), beserta perubahannya.

- g. Perjanjian Kredit dapat dilakukan secara di bawah tangan.¹³

Agen BRILink berkedudukan hanya sebagai kepanjangan tangan dari BRI jika ada nasabah yang membutuhkan kredit atau referral/rekomendasi, jika ada calon nasabah yang ingin mengajukan pinjaman usaha dapat datang ke agen BRILink terdekat, kemudian pihak agen memberitahukan kepada Account Officer dan selanjutnya akan ditindak lanjuti oleh AO.



Gambar 4. Alur permohonan Kredit Melalui Agen BRILink

Dari bagan tersebut pemohon kredit selaku UMKM melakukan pendaftaran kredit melalui Agen BRILink terdekat, setelah pendaftaran kredit, Agen BRILink melakukan perekomendasi calon nasabah ke kantor cabang BRI

¹³

Ibid

atau Kantor Unit BRI dibawah naungan BRI Kanca Manukan. Rekomendasi dari agen diteruskan kepada account officer dan ditindak lanjuti selambat-lambatnya 14 hari kerja dengan melakukan kunjungan ke pemohon kredit. Dengan adanya layanan kredit usaha rakyat (KUR) yang diberikan BRI melalui agen BRILink untuk wilayah Surabaya bagian barat yang tempatnya jauh dari unit seperti salah satu agen BRILink yaitu Habibi Cell, banyak calon nasabah mikro yang ingin mengajukan kredit usaha melalui agen BRILink. Adanya system kepercayaan nasabah Agen BRILink di perkotaan dan pedesaan. Mereka yang di daerah perkotaan lebih banyak menaruh kepercayaan untuk datang langsung ke kantor Bri unit terdekat dan mereka yang di pedesaan karena jauh dari unit lebih percaya kepada agen daripada datang ke BRI. Maka hal tersebut mejadi kendala yang dihadapi oleh agen BRILink yang berada di Kota Surabaya.

Calon nasabah yang mengajukan kredit usaha rakyat (KUR) tentunya tidak langsung di rekomendasikan oleh Bapak Mukhamadun kepada Acoount officer atau mantri unit kantor BRI Manukan. Bapak Mukhamadun tentunya menyeleksi terhadap calon nasabah, seperti kredabilitas calon nasabah untuk kewajiban membayar hutang nanti, Usaha yang dimiliki calon nasabah sudah berjalan lebih dari 6 bulan, jaminan yang sesuai. Setelah persyaratan sesuai dengan keadaan dilapang, maka Bapak Mukhamadun merekomendasikan ke Mantri Kantor Unit terdekat untuk ditindak lanjuti. Waktu yang dibutuhkan oleh mantri unit atau account officer sebagai pemrakarsa kredit adalah 14 hari kerja. Setelah bapak Mukhamadun berhasil merekomendasikan calon nasabah KUR dan mereka yang direkomendasikan menjadi nasabah kredit BRI maka Bapak mendapatkan fee sebesar Rp 25.000/ nasabah

Kebutuhan kredit mikro atau kredit usaha rakyat tidak dibutuhkan oleh nasabah BRI yang memiliki usaha yang berjualan di pasar atau toko saja, namun ada juga agen BRILink yang membutuhkan modal usaha untuk menjalankan BRILinknya. Untuk Modal usaha agen Brinlink berbeda dengan modal usaha lainnya yaitu dengan pembayaran bunganya. Pembayaran bunganya adalah Rp 3000/hari. Hal tersebut membuat para agen lebih ringan dalam membayar modal usaha. Plafon yang didapatkan oleh agen yang membutuhkn modal adalah dibawah 100 juta rupiah. Jadi saat ini agen yang berada di pinggiran Kota Surabaya yang tempatnya jauh dari kantor unit BRI lebih efektif penggunaan fasilitas BRILink daripada agen yang berada di perkotaan atau tempatnya dekat dengan kantor BRI.

Meninjau dari uraian diatas dapat disimpulkan efektivitas layanan keuangan tanpa kantor dalam penyaluran kredit di BRI Cabang Manukan ditinjau atas dasar beberapa tolakukur efektivitas. Menurut Soerjono Soekanto bahwa faktor tersebut ada lima, yaitu¹⁴ :

1. Hukumnya sendiri.

Faktor hukum dalam hal ini dapat diambil contoh salah satu penanganan kredit bagi UMKM yg dimohon nasabah kepada BRI melalui BRILink belum ada regulasi yang jelas. Hal ini ditunjukkan dengan semua calon nasabah kredit dimasukkan kedalam kredit program Pemerintah atau Kredit Usaha Rakyat (KUR).

2. Penegak hukum.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm 8

Faktor penegak hukum dalam hal ini adalah badan atau lembaga yang mengawasi proses penyaluran kredit melalui Agen BRILink belum ada atau belum terkoordinir dengan jelas. Selama ini pihak BRI dan BRILink hanya menyalurkan kredit bagi UMKM sebatas kepercayaan yang diberikan BRI kepada BRILink untuk melakukan refensial kepada calon nasabah yang mengajukan Kredit. Pihak BRI yang menangani kredit referensial dari Agen BRILink sendiri mengalami keterbatasan mengenai adanya Pasal 8 POJK Nomor 19/POJK.03/2014 dengan ditunjukkan semua calon nasabah kredit dimasukkan kedalam kredit program Pemerintah atau Kredit Usaha Rakyat (KUR).

3. Sarana dan fasilitas.

Faktor yang selanjutnya yaitu sarana dan fasilitas yang menunjang untuk melakukan kegiatan laku pandai khususnya dibidang penyaluran kredit UMKM sudah tergolong bagus, dilihat dari sisi ketersediaan mesin EDC setiap agen BRILink untuk mempermudah transaksi dan adanya sarana telekomunikasi pihak Agen BRILink kepada BRI khususnya karyawan *account officer* dapat lebih memudahkan Agen untuk memberikan informasi mengenai calon nasabah UMKM. Hal ini dapat mempercepat proses penanganan calon nasabah kredit untuk ditindaklanjuti oleh *account officer*.

4. Masyarakat.

Masyarakat memegang peran penting guna menjalankan suatu tujuan tertentu, minimnya pengetahuan masyarakat terutama UMKM tentang adanya kredit melalui BRILink menjadi kendala utama yang dihadapi Agen dan

pihak BRI untuk menjalankan tujuan utama menyalurkan kredit UMKM melalui BRILink.

5. Kebudayaan.

Kebudayaan masyarakat khususnya UMKM untuk melakukan permohonan kredit melalui BRILink masih terlalu kecil, dengan rasa kepercayaan sebagian masyarakat, terutama masyarakat kota, terhadap agen BRILink belum terlalu besar. Hal ini mengakibatkan masyarakat lebih memilih untuk datang langsung ke kantor BRI terdekat dalam hal melakukan permohonan kredit.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum. Kelima faktor yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut, tidak ada faktor mana yang sangat dominan berpengaruh, semua faktor tersebut harus saling mendukung untuk membentuk efektifitas hukum. Lebih baik lagi jika ada sistematika dari kelima faktor ini, sehingga hukum dinilai dapat efektif.

D. Hambatan Dalam Pelaksanaan Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Penyaluran Kredit

Kata penghambat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai hal, keadaan atau penyebab lain yang menghambat (merintang, menahan, menghalangi). Sedangkan pengertian dari hambatan adalah sesuatu yang dapat menghalangi kemajuan atau pencapaian suatu hal. Pada hasil penelitian ini faktor penghambat pelaksanaan layanan keuangan tanpa kantor dalam penyaluran kredit UMKM melalui Agen BRILink terbagi menjadi dua kategori, yaitu :

1. Hambatan Non Hukum, hambatan Non Hukum yaitu keadaan atau penyebab yang menghambat, merintangi, menahan atau menghalangi untuk mencapai tujuan, diluar peraturan yang mengatur dalam Undang-undang atau peraturan yang bersangkutan. Antara lain :
 - a. Proses permohonan kredit yang berbelit – belit, pemohon kredit memilih langsung datang ke BRI terdekat untuk melakukan permohonan pinjaman, jika melalui Agen BRILink harus mendaftar ke Agen BRILink setelah itu Agen Baru membuat rekomendasi ke BRI membutuhkan waktu yang lama.
 - b. Sistem informasi debitur bank Indonesia (SID BI) calon nasabah menunjukkan kolektabilitas melebihi angka yang ditentukan.
 - c. Tidak Mempunyai usaha produktif dan layak.
 - d. Usaha belum secara aktif melakukan kegiatan kurang dari 6 bulan, berdasarkan atas hasil pemeriksaan (on the spot) oleh AO dan dituangkan dalam Formulir Lembar Kunjungan Nasabah (LKN).
 - e. Minimnya kepercayaan masyarakat terhadap Agen BRILink untuk melakukan permohonan Kredit maupun transaksi lainnya.
2. Hambatan Hukum, hambatan hukum yaitu keadaan atau penyebab yang menghambat, merintangi, menahan atau menghalangi untuk mencapai tujuan, yang ada dalam peraturan yang mengatur dalam Undang-undang atau peraturan yang bersangkutan. Antara lain :
 - a. UMKM Belum berbadan hukum

- b. Belum Memiliki Surat Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) yang diterbitkan Pemerintah Daerah setempat atau surat ijin usaha lainnya yang dapat dipersamakan dengan IUMK
- c. Usaha yang di jalankan diluar dari Pasar Sasaran Kriteria Resiko yang dapat diterima (PS KRD) BRI
- d. Legalitas Calon Debitur :
 - 1) Individu : Identitas berupa KTP dan Kartu Keluarga.
 - 2) Koperasi : Anggaran Dasar beserta perubahannya.
 - 3) Badan usaha lainnya: Akta Pendirian beserta perubahannya.
- e. Para pemohon kredit tetap dipersyaratkan jaminan (agunan tambahan) oleh pihak BRI Cabang Manukan. Padahal ditegaskan dalam penyaluran kredit UMKM dijamin oleh PT. Askrindo dan PT. Jamkrindo. Seharusnya pihak BRI Cabang Manukan tidak perlu mempersyaratkan jaminan tambahan.
- f. Agunan pokok dan agunan tambahan belum mengcover jumlah kredit yang di mohon (agunan dibawah 60%)

E. Upaya Mengatasi Hambatan dalam Pelaksanaan Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Penyaluran Kredit

Upaya bank adalah membantu para pengusaha pemohon kredit usaha tersebut, seperti dalam mengatasi beberapa kendala yang dihadapi oleh Bank dalam penyaluran kredit yang di amati dalam praktek lapangan :

1. Upaya bank dalam mengatasi kendala pembukuan. Bank memberitahu pemohon seperti apa pembukuannya, kalau memang Pemohon benar-benar tidak mengerti, bank akan membantu Pemohon membuat pembukuan yang benar berdasarkan bon-bon yang ada, dengan bon itu pihak bank bisa menganalisis bagaimana konsisi keuangan dan tingkat keberhasilan usahanya.
2. Upaya bank dalam mengatasi kendala aspek legal. Pihak bank memberitahu kepada pengusaha bagaimana caranya mengurus surat surat ijin tersebut. Memberitahu para pemohon, kemana para pemohon tersebut harus mengurus surat surat ijinnya. Seperti keterangan domisili usaha pemohon bisa mengurus ke Kelurahan setempat, tempat pemohon melakukan aktifitas usahanya. Jika usaha pemohon yang cukup besar (usaha menengah) biasanya diperlukan SIUP, pemohon dapat mengajukan permohonan pembuatan siup tersebut ke dinas perdagangan.
3. Upaya bank dalam mengatasi kendala agunan yang tidak diikat secara sempurna. Maka dilakukan perjanjian kredit dibawah tangan.
4. Upaya bank dalam mengatasi kendala pengetahuan pemohon yang masih tradisional. Bank akan menjelaskan kepada pemohon bagaimana cara pengajuan permohonan kredit dan apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan permohonan kredit tersebut.
5. Melakukan pertolongan membuat Surat Ijin Usaha.
6. Melakukan rekomendasi terhadap calon debitur bahwa calon debitur tersebut mampu melakukan kewajiban kredit.

7. BRI beserta mitra atau Agen BRILink melakukan promosi atau pengenalan produk BRILink kepada masyarakat umum untuk meningkatkan kepercayaan terhadap Agen BRILink.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh dari penulisan tentang efektivitas penyaluran kredit UMKM dalam rangka keuangan tanpa kantor adalah sebagai berikut:

1. Penyaluran kredit melalui Agen BRILink sebagai mitra BRI dengan tujuan mengembangkan usaha BRI itu sendiri masih terjadi tumpang tindih terhadap penerapan pasal 8 POJK Nomor 19/POJK.03/2014 dimaksud dengan bukti bahwa item dari POJK tentang pelaksanaan kredit melalui Agen BRILink belum bisa efektif.
2. Kredit melalui Agen BRILink perlu ada sosialisasi secara baik, benar untuk mengatasi faktor yang menjadi hambatan terhadap penerapan pasal 8 POJK Nomor 19/POJK.03/2014 yang menyebabkan masyarakat UMKM (Calon Debitur) beranggapan pengajuan kredit melalui Agen BRILink rumit dan dianggap tidak efektif karena pihak BRI membuat aturan tersendiri mengenai proses penyaluran kredit UMKM melalui BRILink yang membuat calon nasabah enggan melalui Agen BRILink.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil yang telah disimpulkan diatas, maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Hukum yang diberlakukan di BRI secara keseluruhan perlu adanya sosialisasi pada masyarakat, UMKM pada khususnya, secara efektif.
2. BRI cabang Manukan perlu melakukan sosialisasi secara baik, benar tentang permohonan kredit melalui Agen BRILink kepada masyarakat, Perealisasi terhadap calon debitur perlu adanya penyederhanaan sehingga menjadi pemahaman yang meyakinkan calon nasabah untuk menjadi yakin terhadap penyaluran kredit UMKM melalui Agen BRILink.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdulkadir Muhammad, **Hukum dan Penelitian Hukum**, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004.

Amirudin Dan H. Zainal Asiki, **Pengantar Metodologi Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, cetakan ke-6, 2012, hlm. 106

Bambang Sunggono, **Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Barda Nawawi Arif, **Kapita Selekta Hukum Pidana**, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003.

Booklet Keuangan Inklusif, Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM Bank Indonesia, 2014.

Brazil Notes On regulations Branchless Banking, CGAP, 2008

Brigit Helms, **Access For All : Building Inclusive Financial System**, Wasington, DC, The World Bank, 2006.

CGAP, Branchless Banking Diagnostic Template, CGAP, February 2010.

Clerence J.Dias, **Research on Legal Service And Poverty: its Relevance to the Design of Legal Service Program in Developing Countries**, Wash. U.L. Q 147 (1975). P. 150

Ezazul Islam dan Salim Al Mamun, **Financial Inclusion, The Role Of Bangladesh Bank**, Dhaka, Research Department Bangladesh Bank Office. 2011

Gunarto Suhardi, **Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum**, Yogyakarta, Kanisius 2003.

Hans Kelsen, **General Teory of Law and State, Translete by Anders Wedberg**, New York: Russel and Russel , 1991, dikuitip dari Jimly Ashidique dan M ali Safa'at, **Teori Hans Kelsen Tentang Hukum**, Jakarta, Konstitusi Press, ctk. Kedua, 2012.

Hermansyah, **Hukum Perbankan Nasional Indonesia**, Jakarta, PT. Kencana, 2005, cet. Ke-5.

Kasmir, **Dasar-Dasar Perbankan**, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Laporan Tahunan BRI, **Kerja Nyata Bagi Negeri Membangun UMKM Unggul Di Era Digital**, 2017

Lexy J. Moelong, **Metodelogi Penelitian Kualitatif**, PT. Remaja Rosdakarya Offset, Bandung, 2012.

Marcus Priyo Gunarto, **Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi**, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2011, Hlm. 71-71, dikutip Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbaini.

Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, **Dualisme Penelitian Hukum Normative Dan Empiris**, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2013.

Puhashendhi Mehrotra, et al., **Financial Inclusion-An Overview**, Occasional Paper 48, Mumbai, Departmen of Economic Analysis and Research, National Bank for Agriculture adn Rural Develompment, 2009.

Rahman. A, *Financial Inclusion as a tool for Combating Poverty : The Bangladesh Appoach*, Nairobi.

Riant Nugroho, **Membangun Entrepreneur Indonesia (Tantangan Manajemen Pemerintahan Jokowi)**, Jakarta, Elex Media Computindo 2015.

Raida L Tobing, dkk, (Hasil Penelitian), **Efektivitas Undang-Undang Money Laundering**, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementrian Hukum dan HAM RI, 2011.

Robert B seidman, **Law order and Power**, Adition Publishing Company Wesley Reading massachusett, 1972.

Ronny Hanintijo Soemitro, **Metode Penelitian Hukum dan Jumetri**, Semarang, Ghalia Indonesia, 1988.

Saifudin Azwar, **Metode Penelitian**, Pustaka, Yogyakarta, 2013.

Salim,H.S dan Erlis Septiana Nurbani, **Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi**, Edsis Pertama, Jakarta, Rajawali Press, ctk Kesatu, 2013.

Sanipah Faisal, **Penelitian Kuantitatif Dasar-dasar dan Aplikasi**, Malang, YA3, 1990.

Soerjono Soekanto, **Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi**, Bandung, Remaja Karya, 1985.

Soerjono soekamto, **Pengantar Penelitian Hukum**, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 1986.

Soerjono Soekamto, **Sosiologi Suatu pengantar**, Bandung, Rajawali Pers, 1996.

Soleman B Taneko, **Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat**, Jakarta, Rajawali Press, 1993.

Sugiyono, **Statistika Untuk Penelitian**, Bandung, 2014

Teguh P. Mulyono, **Manajemen Perkreditan Komersil**, Yogyakarta, BPFE, 1987.

Supardi dan Anwar, Saiful, **Dasar Dasar Perilaku Organisasi**. Yogyakarta, UII Press, 1993.

United Nations, ***Building Inklusif Financial Sectors For Development***, New York, The United Nations Department Of Public Information, 2006

UNDANG - UNDANG

Nomor 6 tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-undang.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014 tentang layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif

INTERNET

<http://www.bi.go.id/id/perbankan/keuanganinklusif/Indonesia/Contents/Default.aspx>

<http://ssbelajar.blogspot.com/2013/04/pengertian-dan-jenis-jenis-kredit.html>

<http://wirmanvalkinz.blogspot.com/2013/09/kumpulan-makalah-manajemen-keuangan.html>

<https://sparkling.surabaya.go.id/about-surabaya/the-history-of-surabaya/>

http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Surabaya/

<http://insurabaya.blogspot.co.id/2014/02/peta-surabaya.html>

[www/http.wikipedia.com](http://http.wikipedia.com), BRI, Sejarah Singkat BRI